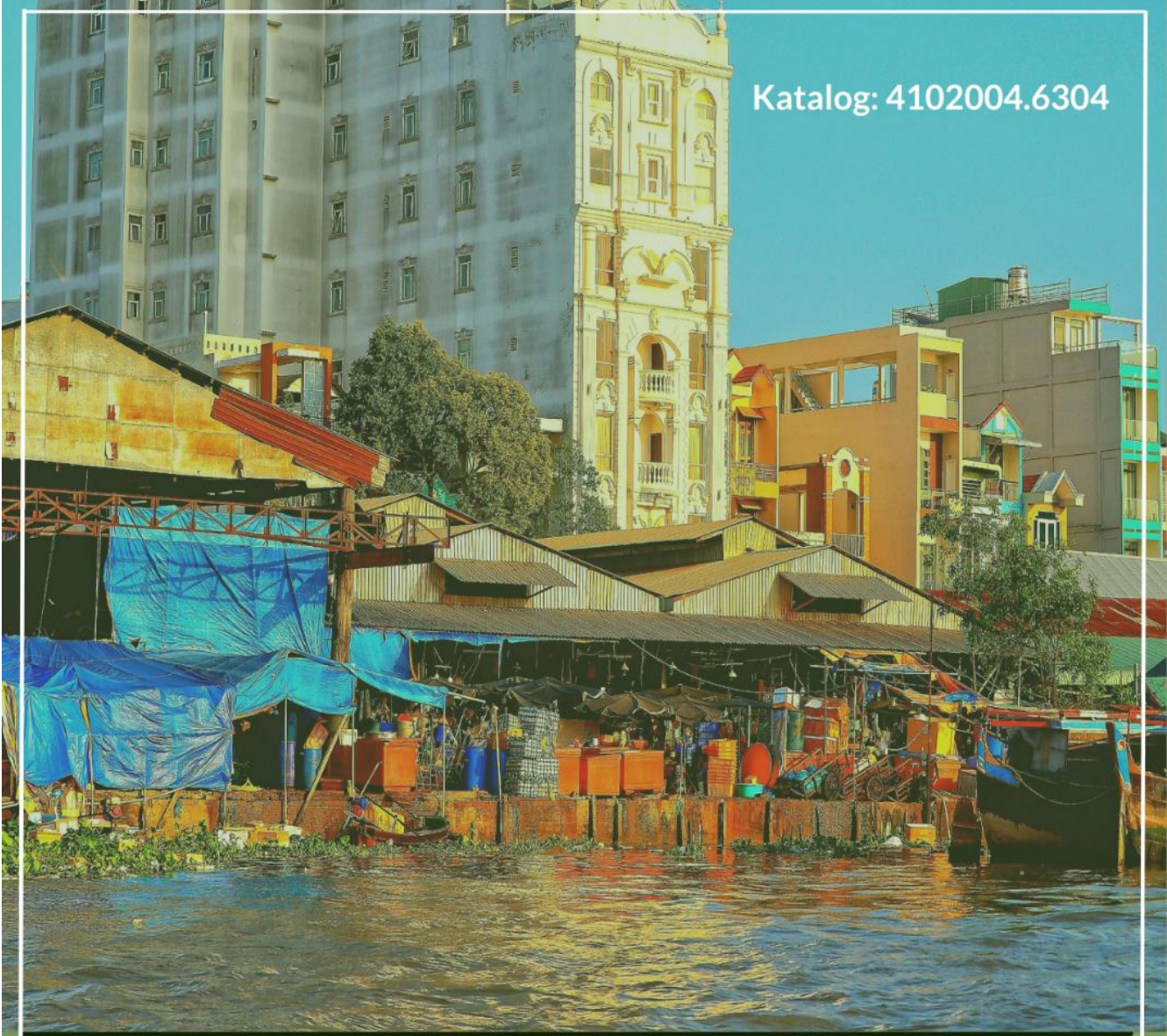


Katalog: 4102004.6304



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN BARITO KUALA 2019/2020



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BARITO KUALA**



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN BARITO KUALA 2019/2020

**Judul Buku: INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
 KABUPATEN BARITO KUALA
 TAHUN 2019/2020**

No. Publikasi : 63040.1926
ISBN : 978-623-6799-10-9
Katalog BPS : 4102004.6304
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : xvi + 103 Halaman

Naskah : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
 Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito
 Kuala

Editor : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
 Kabupaten Barito Kuala

Gambar Kulit : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
 Kabupaten Barito Kuala

Diterbitkan Oleh : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito
 Kuala

Dicetak Oleh : CV. Karya Bintang Musim

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan bagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT kami panjatkan mengiringi terbitnya Publikasi "**Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020/2021**". Publikasi ini merupakan publikasi yang menyajikan data indikator kesejahteraan rakyat di Kabupaten Barito Kuala beserta analisisnya.

Publikasi ini menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Barito Kuala antar waktu dan perbandingannya antar wilayah. Aspek yang disajikan adalah aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Aspek tersebut antara lain Kependudukan dan fertilitas, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan, serta pola konsumsi dan kemiskinan. Sumber data pokok yang digunakan adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Survei Ketenagakerjaan Nasional (SAKERNAS), dan data dari berbagai sumber lain yang menunjang.

Informasi yang disajikan dalam publikasi ini diharapkan dapat berguna bagi para perencana pada proses perencanaan, pelaksanaan, pelaksanaan, pengawasan serta bahan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Namun demikian kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan publikasi dimasa yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah membantu hingga terbitnya publikasi ini diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Akhirnya, semoga penerbitan publikasi ini mendapatkan rahmat dari Allah SWT, dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Marabahan, Agustus 2021

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BARITO KUALA,**



Eddy Erwan Nopiannoor, S.Si., MP

NIP. 197511231994121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
KONSEP DAN DEFINISI.....	x
PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan.....	5
1.3 Ruang Lingkup	6
1.4 Sumber Data.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
DEMOGRAFI DAN KEPENDUDUKAN	10
2.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk	11
2.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk	13
2.3 Struktur dan Komposisi Penduduk	18
2.4 Fertilitas Penduduk dan Keluarga Berencana	24
KESEHATAN.....	30
3.1 Derajat Kesehatan Masyarakat	31
3.2 Kesehatan Balita	32
PENDIDIKAN.....	40
4.1 Angka Melek Huruf	41

4.2	Rata-rata Lama Sekolah	45
4.3	Tingkat Pendidikan.....	46
4.4	Tingkat Partisipasi.....	47
	KETENAGAKERJAAN	54
5. 1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	55
5. 2	Daya Serap Tenaga Kerja	58
5. 3	Produktivitas Pekerja	62
5. 4	Tingkat Pengangguran Terbuka	64
	PERUMAHAN.....	70
6.1	Penguasaan Tempat Tinggal	72
6.2	Fasilitas Tempat Tinggal	73
	POLA KONSUMSI DAN KEMISKINAN	82
7.1	Pola Konsumsi.....	82
7.2	Distribusi Pendapatan	88
7.3	Kemiskinan.....	91
	KESIMPULAN	100

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Barito Kuala Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014 s.d. 2019 (Jiwa).....	12
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Kabupaten Barito Kuala Per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019 (Jiwa).....	14
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan <i>Sex Ratio</i> Per kelompok Umur di Kabupaten Barito Kuala, 2019	19
Tabel 2.4	Rasio Ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019	23
Tabel 3.1	Angka Morbiditas Kabupaten Barito Kuala Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2019	32
Tabel 3.2	Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Dua Tahun Terakhir Menurut Karakteristik dan Berat Badan Bayi yang Dilahirkan Terakhir, 2019	34
Tabel 4.1	Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun Menurut Karakteristik dan Status Pendidikan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019	47
Tabel 4.2.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal dan Non Formal Penduduk Berumur 7 s.d. 18 Tahun menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019	48
Tabel 4.3	Angka Partisipasi Murni (APM) Formal dan Non Formal Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Barito Kuala tahun 2019	50
Tabel 5.1	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019	58

Tabel 5.2	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Sektor Lapangan Usaha Pekerjaan utama Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kabupaten Barito Kuala, Agustus 2019	59
Tabel 5.3	Persentase penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kabupaten Barito Kuala, 2019	61
Tabel 5.4	Persentase Pengangguran, Setengah Pengangguran, Pekerja Paruh Waktu dan Pekerja Penuh Waktu Kabupaten Barito Kuala, Agustus 2019	63
Tabel 7.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Kelompok Pengeluaran Sebulan Per Kapita di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019.	85
Tabel 7.2	Pengeluaran Makanan Per kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 s.d. 2019.	86
Tabel 7.3	Pengeluaran Nonmakanan Per kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 s.d. 2019	87
Tabel 7.4	Distribusi Pembagian Pengeluaran per Kapita dan Indeks Gini, Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 s.d. 2019	89

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.2	Persentase Sebaran Penduduk Kabupaten Barito Kuala Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019	15
Gambar 2.3	Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Barito Kuala per Kecamatan Tahun 2019	17
Gambar 2.4	Piramida Penduduk Kabupaten Barito Kuala, 2019.....	20
Gambar 2.5	Komposisi Penduduk Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019.	21
Gambar 2.6	Persentas Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Barito Kuala, 2019	24
Gambar 2.7	Persentase Penduduk Perempuan Usia 15 s.d 49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Status Keikutsertaan KB Kabupaten Barito Kuala, 2019	26
Gambar 3.3	Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Pernah Mendapat Imunisasi menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019	35
Gambar 4.2	Kemampuan Membaca dan Menulis Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019.....	44
Gambar 4.3	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Penduduk Usia 25 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019	45
Gambar 5.1	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama Selama Seminggu yang lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Kuala, 2019	56
Gambar 5.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Kuala, 2019	65

Gambar 5.3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Barito Kuala, 2019	66
Gambar 6.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Barito Kuala, 2019.....	76
Gambar 7.1	Persentase Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2014 s.d. 2019	84
Gambar 7.2	Garis Kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala 2005-2019,	93
Gambar 7.3	Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005 s.d. 2019	94
Gambar 7.4	Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2002 s.d. 2019	95
Gambar 7.5	Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005 s.d. 2019	96

KONSEP DAN DEFINISI

Kependudukan

- **Penduduk** adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografi RI selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.
- **Kepadatan Penduduk** adalah banyaknya penduduk per satuan wilayah dalam kilometer persegi.
- **Rata-rata Pertumbuhan Penduduk** adalah angka yang menunjukkan tingkat penambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar.
- **Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*)** adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan.
- **Rumah Tangga** adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya tinggal bersama atau makan dari satu dapur. Yang dimaksud makan dari satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola bersama-sama menjadi satu.
- **Umur Median** digunakan untuk melihat struktur penduduk suatu wilayah, apakah relative "Tua atau Muda". Ditafsirkan sebagai umur yang membagi tepat penduduk menjadi dua bagian, yaitu di atas atau di bawah umur tersebut.
- **Rasio Ketergantungan** menggambarkan beban tanggungan ekonomi kelompok usia produktif (15-64 tahun) terhadap kelompok usia muda (kurang dari 15 tahun) dan usia tua (65 tahun atau lebih).

Kesehatan

- **Angka Kesakitan/Morbiditas** adalah persentase penduduk yang mengalami keluhan sakit dan terganggu akibat keluhan tersebut.
- **Angka kontak** pada fasilitas pelayanan kesehatan digambarkan sebagai persentase penduduk yang pernah berobat jalan dari seluruh penduduk yang mengalami keluhan kesehatan selama satu bulan terakhir.
- **Rata-rata Lama Sakit (RLS)** menggambarkan tingkat intensitas penyakit yang dialami penduduk.
- **Asi Eksklusif (*Exclusively Breastfeeding*)** menggambarkan tingkat kesadaran orang tua terhadap pemberian ASI yang benar, merupakan persentase balita yang diberi ASI tanpa makanan tambahan.

Fertilitas dan KB

- **Pasangan Usia Subur (PUS)** adalah pasangan suami istri yang pada saat ini hidup bersama, baik bertempat tinggal resmi dalam satu rumah ataupun tidak, dimana umur istrinya antar 15-49 tahun.
- **Rata-rata Umur Perkawinan Pertama (*Singulate Mean Age of Marriage = SMAM*)** adalah rata-rata seorang wanita pada saat melaksanakan perkawinan pertama kali.
- **Partisipasi KB** adalah proporsi peserta keluarga berencana (KB) aktif terhadap jumlah pasangan usia subur (PUS).
- **Kontap** merupakan alat/cara KB yang bersifat permanen/mantap, meliputi : MOW, MOP, AKDR/IUD, dan Susuk/Implant.

Pendidikan

- **Angka Partisipasi Kasar (APK)** menggambarkan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan pendidikan tersebut.
- **Angka Partisipasi Murni (APM)** merupakan persentase jumlah anak yang sekolah di suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah anak pada kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.
- **Angka Partisipasi Sekolah (APS)** menggambarkan proporsi anak yang bersekolah pada suatu kelompok umur sekolah jenjang pendidikan tertentu. Angka partisipasi sekolah memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak kelompok umur tertentu yang sedang bersekolah, tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang diikuti.
- **Angka Putus Sekolah (APts)** menunjukkan tingkat kegagalan sistem pendidikan menurut jenjangnya. Perbandingan antara penduduk dalam kelompok umur tertentu yang putus sekolah di jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok umur tersebut yang sedang sekolah pada jenjang tersebut.

Perumahan

- **Luas Lantai:** Luas Lantai yang ditempati dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sebatas atap.
- **Fasilitas Air Minum:** Instalasi air minum yang dikelola oleh PAM/PDAM atau non PAM/PDAM termasuk sumur gali dan sumur pompa.
- **Air Bersih** adalah air yang bersumber dari: air minum kemasan, air ledeng, sumur bor, sumur terlindung, atau mata air terlindung. Khusus untuk air minum yang bersumber dari sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung harus memenuhi jarak ≥ 10 meter dari penampungan akhir tinja terdekat.

- **Air Minum Layak** adalah air minum yang bersumber dari: air ledeng, sumur bor/pompa, air hujan, sumur terlindung, atau mata air terlindung. Khusus untuk yang bersumber dari sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung harus memenuhi jarak ≥ 10 meter dari penampungan akhir tinja terdekat.
- **Sanitasi Layak** adalah fasilitas buang air besar sendiri atau bersama dengan jenis kloset leher angsa dan tangki septik sebagai tempat akhir pembuangan kotoran.
- **Penerangan Listrik** adalah sumber penerangan yang berasal dari listrik PLN dengan meteran atau tanpa meteran listrik maupun listrik non PLN (listrik tenaga surya, generator).

Ketenagakerjaan

- **Penduduk Usia Kerja** adalah penduduk berumur 15 tahun keatas.
- **Penduduk angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja dengan kegiatan:
 - Bekerja, atau
 - Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, atau
 - Pengangguran.
- **Penduduk bukan angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja dengan kegiatan:
 - Bersekolah, atau
 - Mengurus rumahtangga atau
 - Melaksanakan kegiatan lainnya.
- **Bekerja** adalah penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, selama paling sedikit 1 jam berturut-turut dalam satu

minggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

- **Sekolah** adalah kegiatan seseorang untuk bersekolah di sekolah formal, mulai dari pendidikan tinggi selama seminggu yang lalu sebelum pencacahan. Tidak termasuk mereka yang sedang libur sekolah.
- **Mengurus rumah tangga** adalah kegiatan seseorang dalam mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah. Misalnya ibu rumah tangga dan anaknya yang membantu mengurus rumah tangga. Sebaliknya, pembantu rumah tangga yang mendapatkan upah meskipun pekerjaannya mengurus rumah tangga dianggap bekerja.
- **Kegiatan lainnya** adalah kegiatan seseorang selain bekerja, sekolah dan mengurus rumah tangga termasuk didalamnya mereka yang tidak mampu melakukan kegiatan seperti orang lanjut usia, cacat jasmani (buta, bisu, dan sejenisnya) dan penerima pendapatan atau pensiun yang tidak bekerja lagi selama seminggu yang lalu.
- **Pengangguran** adalah penduduk yang pada periode survei tidak bekerja dengan kegiatan:
 - Sedang mencari pekerjaan, atau
 - Sedang mempersiapkan usaha, atau
 - Penduduk yang tidak mencari pekerjaan, karena alasan merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa), atau
 - Sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
- **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** adalah rasio jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15+).
- **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** adalah rasio antara jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

- **Pekerja tidak penuh** adalah mereka yang bekerja dengan jumlah jam kerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), terdiri dari:
 - **Setengah pengangguran** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran terpaksa)
 - **Pekerja paruh waktu** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran sukarela)
- **Lapangan usaha** adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/ perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja.
- **Sektor Pertanian (*Agriculture*)** meliputi subsektor pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan dan hortikultura, kehutanan, perburuan, subsektor peternakan dan perikanan.
- **Sektor Industri (*Manufacture*)** meliputi subsektor Pertambangan dan Penggalian, Industri, Listrik dan Air Bersih, Bangunan
- **Sektor Jasa (*Services*)** meliputi subsektor Perdagangan, Rumah Makan, Angkutan, Keuangan, dan Jasa-jasa.

<https://baritokualakab.bps.go.id>



BABI

PENDAHULUAN

<https://babi.com>



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai Negara (Pemerintah) dan akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konsep kemakmuran rakyat ini kemudian dijabarkan oleh Pemerintah melalui berbagai macam program pembangunan sebagaimana tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Pendek/Panjang (RPJM). Pembangunan didefinisikan sebagai suatu perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau manusiawi. Pembangunan ekonomi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dijabarkan dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diyakini akan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan indikator naiknya angka Produk Domestik Bruto (PDB) riil perkapita.

Pada kenyataannya, laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta-merta mengatasi masalah sosial ekonomi seperti pengangguran, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Berpijak dari hal tersebut, konsep pembangunan ekonomi perlu didefinisikan ulang (*redefined*). Tujuan pembangunan ekonomi bukan lagi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya, melainkan bertujuan menghapus atau mengurangi penduduk miskin, menanggulangi ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja (Todaro, 2000).

Sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi yang telah didefinisikan ulang tersebut, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat dengan

menetapkan kebijakan-kebijakan di bidang sosial dan ekonomi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Wujud realisasi dari kebijakan tersebut di antaranya Program Wajib Belajar 9 Tahun, Program KB, intervensi/perlindungan daya beli masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin melalui program bantuan dan perlindungan sosial—Program Keluarga Harapan (PKH), Raskin, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Jamkesmas, Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan untuk penyandang cacat dan lansia, dll—program pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri, dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) melalui penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Program-program yang diyakini sangat pro rakyat tersebut diharapkan dapat melindungi kinerja perekonomian untuk tetap mampu menyediakan kesempatan kerja, meningkatkan kualitas SDM, dan mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Upaya pemerintah meningkatkan pembangunan di semua bidang memerlukan perencanaan yang cermat dan terarah, yang harus didukung oleh tersedianya data dan informasi yang lengkap tentang sejauh mana capaian pembangunan yang telah dilaksanakan. Tanpa adanya dukungan data penting tersebut, para penentu kebijakan dan pembuat keputusan kemungkinan akan membuat kekeliruan dalam menentukan target, kebijakan, dan membuat program yang tidak cocok untuk kelompok masyarakat yang menjadi sasarannya.

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan itu diperlukan data dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan. Salah satu informasi yang dapat digunakan untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan adalah indikator sosial ekonomi yang diharapkan dapat menggambarkan fenomena sosial dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat, terutama yang berhubungan dengan taraf hidup, pemerataan pembangunan dan juga kesejahteraan rakyat.

Indikator kesejahteraan rakyat sangat diperlukan oleh para perencana, penentu kebijakan dan pengambil keputusan untuk: 1)

menilai hasil dan distribusi kesejahteraan masyarakat; 2) memantau dampak sosial dari kebijaksanaan pembangunan; 3) untuk mengukur kondisi, keadaan, dan *trend* kesejahteraan penduduk serta untuk memantau perkembangannya sepanjang waktu; dan 4) untuk memantau kondisi dari kelompok penduduk pada lapisan masyarakat tertentu yang mungkin masih memerlukan perhatian dan bantuan khusus.

Di Indonesia, data tentang karakteristik sosial masyarakat dikumpulkan melalui berbagai cara seperti Sensus Penduduk, Survei Penduduk antar Sensus (Supas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Dari beberapa jenis sensus/survei tersebut diatas, Susenas merupakan survei dengan cakupan data sosial kependudukan paling lengkap. Dari data yang dihasilkan, dapat disusun berbagai indikator sosial atau indikator kesejahteraan masyarakat seperti indikator di bidang kependudukan, kesehatan, pendidikan, fertilitas dan keluarga berencana, partisipasi ekonomi/ketenagakerjaan, kondisi dan fasilitas perumahan, konsumsi dan pengeluaran rumah tangga, kemiskinan dan sebagainya.

1.2 Tujuan

Dimensi kesejahteraan rakyat disadari sangat luas dan kompleks sehingga suatu taraf kesejahteraan rakyat hanya dapat terlihat (*visible*) jika dilihat dari suatu aspek tertentu. Oleh karena itu, publikasi ini hanya menyajikan permasalahan kesejahteraan rakyat yang dapat diamati dan dapat diukur (*measurable welfare*) dengan menggunakan berbagai indikator sosial, antara lain; Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB), Kesehatan, Pendidikan, Perumahan, dan Ketenagakerjaan, Kemiskinan, Konsumsi/pengeluaran, dan indikator kesejahteraan lainnya.

Penerbitan publikasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang kondisi serta dinamika sosial ekonomi kehidupan masyarakat di Kabupaten Barito Kuala. Lebih khusus lagi melihat tingkat kesejahteraan rakyat, sebagai tolak ukur keberhasilan

pembangunan. Dari gambaran tersebut diharapkan diperoleh hal-hal yang bermanfaat guna mengantisipasi berbagai kendala atau hambatan sehingga dapat disusun perencanaan yang lebih baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Barito Kuala.

Indikator ini juga sangat penting bagi para perencana pembangunan dan pengambil kebijakan daerah untuk mengetahui sejauh mana kualitas pembangunan telah dicapai. Apalagi sejak pelaksanaan otonomi daerah tahun 2000, dimana kabupaten/kota memiliki kebijakan dan kewenangan yang lebih besar untuk menjalankan roda pembangunan, sehingga daerah mempunyai peran sangat penting dalam menyiapkan dan meningkatkan sumber daya yang dimilikinya.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup bahasan dalam penulisan indikator kesejahteraan rakyat ini akan dibatasi untuk wilayah administrasi Kabupaten Barito Kuala. Karena keterbatasan jumlah sampel rumah tangga Susenas, maka data yang disajikan tidak seluruhnya bisa menampilkan angka sampai tingkat kecamatan.

1.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk data jumlah dan komposisi penduduk diperoleh dari proyeksi penduduk;
2. Untuk materi kesehatan, pendidikan, fertilitas, perumahan, konsumsi/pengeluaran serta kemiskinan diperoleh dari Susenas 2019;
3. Untuk materi ketenagakerjaan diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2019.
4. Serta sumber data lainnya yang menunjang analisis baik dari sensus/survei BPS maupun data dari instansi terkait.

1.5 Sistematika Penulisan

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 ini disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Tujuan, Ruang Lingkup, Sumber Data, serta Sistematika Penyajian
- Bab II menyajikan tentang Demografi dan Kependudukan
- Bab III menyajikan tentang Kesehatan
- Bab IV menyajikan tentang Pendidikan
- Bab V menyajikan tentang Ketenagakerjaan
- Bab VI menyajikan tentang Perumahan
- Bab VII menyajikan tentang Pola Konsumsi dan Kemiskinan
- Bab VIII Menyajikan kesimpulan



BAB II

DEMOGRAFI DAN KEPENDUDUKAN



BAB II

DEMOGRAFI DAN KEPENDUDUKAN

Penduduk adalah modal dasar yang paling penting dalam pembangunan. Ibarat pisau bermata dua, penduduk yang besar dapat menjadi modal dasar pembangunan yang sangat potensial, namun di sisi lain keberadaan jumlah penduduk yang besar dapat merupakan beban bagi pembangunan. Penduduk merupakan faktor yang dominan dalam pelaksanaan pembangunan, karena penduduk bukan saja merupakan pelaksana (subjek) melainkan juga sebagai sasaran akhir (objek) dari proses pembangunan. Penduduk yang besar akan menjadi potensi jika tersebar merata, berpendidikan, sehat, berdaya saing dan berbudaya. Kondisi sebaliknya terjadi jika penduduk yang banyak hanya menggerombol di suatu wilayah saja, berpendidikan rendah, sakit-sakitan, berdaya saing rendah dan rawan konflik sosial. Oleh karena itu, guna menunjang keberhasilan pembangunan, fokus perhatian pemerintah terhadap masalah kependudukan sebaiknya tidak hanya mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk saja, melainkan juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing.

Dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan, perkembangan bidang kependudukan perlu diarahkan sehingga memiliki karakteristik yang dapat menunjang dan menguntungkan pembangunan. perkembangan kependudukan diarahkan pada pengendalian kuantitas, perkembangan kualitas, serta pengarahannya mobilitas penduduk, sebagai potensi sumber daya manusia agar menjadi kekuatan pembangunan. Tujuan dari perkembangan kependudukan, yaitu untuk mewujudkan keserasian, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, persebaran penduduk, dengan lingkungan hidup.

Berbicara masalah kependudukan tidak terlepas dari jumlah dan laju pertumbuhan, komposisi serta sebaran penduduk. Suatu analisis kependudukan menjadi penting, mengingat sifat profil penduduk yang selalu mengalami perubahan sejalan dengan perjalanan waktu. Perubahan tersebut terjadi karena perubahan komponen penduduk, yaitu; kelahiran, kematian, dan migrasi. Dengan tersedianya data kependudukan, maka memungkinkan untuk dilakukan suatu analisis mengenai keadaan kependudukan di suatu daerah. Dengan demikian, perubahan penduduk yang terjadi antar waktu akan dapat diketahui dengan mudah.

2.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Satu sisi penduduk dapat menjadi modal besar bagi pembangunan, tetapi di sisi lain penduduk bisa menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini terjadi jika pertumbuhan penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan seperti, pangan, sandang, papan, akses pendidikan serta kesehatan yang layak. Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah sosial yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan harus tercukupi agar tidak terjadi kasus busung lapar yang dapat meningkatkan risiko kematian penduduk. Penambahan jumlah penduduk juga harus searah dengan ketersediaan pemukiman yang layak agar tidak memunculkan pemukiman-pemukiman liar dan kumuh. Selain itu, sarana kesehatan dan pendidikan serta tenaga penunjangnya pun harus tersedia seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk.

Jumlah penduduk di Kabupaten Barito Kuala mengalami penambahan setiap tahunnya. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk secara total sebanyak 313.595 jiwa di tahun 2019. Dari hasil Sensus Penduduk di tahun 2010, diketahui jumlah penduduk Kabupaten Barito Kuala sebesar 276.147 jiwa. Hal ini

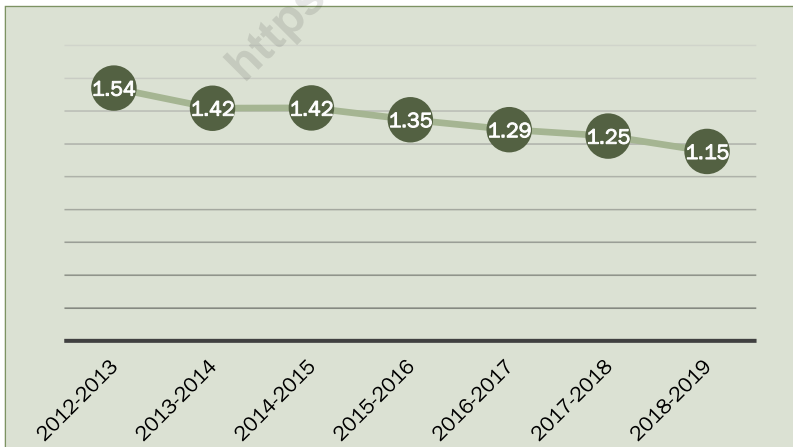
menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk mencapai 13,56 persen jika dibandingkan dengan kondisi di tahun 2010.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Barito Kuala Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014 s.d. 2019 (Jiwa)

Jenis Kelamin	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-Laki	147 366	149 619	151 698	153 693	155 586	157 433
Perempuan	146 743	148 663	150 606	152 502	154 430	156 162
Total	294 109	298 282	302 304	306 195	310 016	313 595

Sumber: Proyeksi Penduduk, BPS Kabupaten Barito Kuala 2019

Pada tabel 2.1 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Barito Kuala di tahun 2019 secara total bertambah sebanyak 3.579 jiwa jika dibandingkan tahun 2018 dengan 51,6 persen penambahan penduduknya adalah perempuan. Akan tetapi, secara umum di tahun 2019 jumlah penduduk laki-laki masih relatif lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk perempuan dengan *sex ratio* sebesar 100,81.



Sumber: Proyeksi Penduduk, BPS Kabupaten Barito Kuala 2019

Gambar 2.1. Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Barito Kuala dari Tahun 2014 s.d. 2019

Meskipun jumlah penduduk terus mengalami penambahan, tren laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan selama 2013-2019 seperti yang terlihat pada Gambar 2.1. Pada tahun 2019, laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,25 persen. Nilai tersebut masih dibawah angka laju pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Selatan yang tumbuh sebesar 1,52 persen di tahun 2019. Artinya, pertumbuhan penduduk di Kabupaten Barito Kuala relatif lebih rendah dibandingkan daerah lain di Provinsi Kalimantan Selatan.

2.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Pada prinsipnya, penduduk akan tinggal di suatu wilayah yang dapat memberikan suatu kehidupan yang layak termasuk kemudahan mendapatkan sandang dan pangan. Persebaran penduduk yang merata antar wilayah secara tidak langsung menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan antar wilayah tersebut hampir mirip. Preferensi penduduk yang lebih memilih tinggal di suatu wilayah dengan segala fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dibandingkan dengan wilayah yang minim akses akan memunculkan masalah. Masalah tersebut adalah ketimpangan distribusi penduduk. Ketimpangan ini terlihat jelas antara wilayah Jawa dan Luar Jawa, atau Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Demikian juga halnya dengan distribusi penduduk di wilayah pedesaan dan perkotaan.

Distribusi penduduk yang tidak merata akan menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah. Wilayah dengan penduduk besar akan dihadapkan dengan berbagai masalah sosial seperti masalah pengangguran yang terjadi akibat tidak memadainya lapangan pekerjaan yang tersedia, ketersediaan lahan pemukiman yang sedikit akan meimbulkan pemukiman kumuh, tidak memadainya akses ke sarana pendidikan dan kesehatan, rawan konflik sosial, dan masalah sosial lainnya. Di sisi lain, wilayah dengan penduduk yang relatif sedikit akan memunculkan persoalan optimalisasi

sumber daya alam terkait kurangnya sumber daya manusia padahal wilayah tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam.

Penduduk Kabupaten Barito Kuala tersebar di 17 (tujuh belas) wilayah administrasi kecamatan dan 201 wilayah desa/kelurahan. Dengan luas wilayah sebesar 2.996,96 km², terdapat 157.433 penduduk laki-laki dan 156.162 perempuan pada tahun 2019.

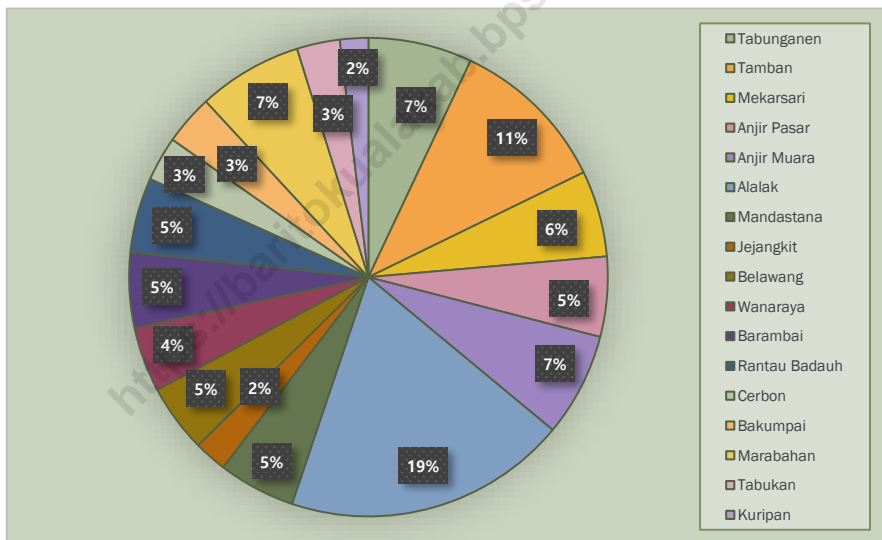
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Barito Kuala Per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019 (Jiwa)

Kecamatan	Jumlah Penduduk			Sex
	Laki-laki	Perempuan	Total	Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tabunganen	11 168	10 845	22 013	103
Tamban	17 027	16 738	33 765	102
Mekarsari	9 118	9 166	18 284	99
Anjir Pasar	8 417	8 518	16 935	99
Anjir Muara	11 034	10 920	21 954	101
Alalak	30 003	30 070	60 073	100
Mandastana	8 219	8 129	16 348	101
Jejangkit	3 565	3 374	6 939	106
Belawang	7 277	7 139	14 416	102
Wanaraya	6 910	6 860	13 770	101
Barambai	8 027	7 884	15 911	102
Rantau Badauh	7 983	7 914	15 897	101
Cerbon	4 760	4 689	9 449	102
Bakumpai	5 322	5 280	10 602	101
Marabahan	11 053	11 076	22 129	100
Tabukan	4 563	4 553	9 116	100
Kuripan	2 987	3 007	5 994	99
BARITO KUALA	157 433	156 162	313 595	101

Sumber: Proyeksi Penduduk, BPS Kabupaten Barito Kuala 2019

Berdasarkan Tabel 2.2., wilayah administrasi yang memiliki jumlah penduduk tertinggi di tahun 2019 adalah Kecamatan Alalak yang

dihuni oleh 60.073 jiwa atau sebesar 19,15 persen dari total penduduk di Kabupaten Barito Kuala. Secara komposisi, di Kecamatan Alalak perbedaan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan tidak signifikan, yaitu sebanyak 30.003 laki-laki (49,94 persen) dan terdapat 30.070 perempuan (50,06 persen). Sementara itu, Kecamatan Kuripan merupakan wilayah administrasi yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yaitu sebanyak 5.921 jiwa atau hanya sekitar 1,91 persen dari jumlah penduduk di Kabupaten Barito Kuala, yang terdiri dari 2.987 penduduk laki-laki dan sebanyak 3.007 penduduk perempuan. Untuk melihat lebih rinci persebaran penduduk di 17 kecamatan, disajikan tabel berikut.



Sumber: Proyeksi Penduduk, BPS Kabupaten Barito Kuala 2019

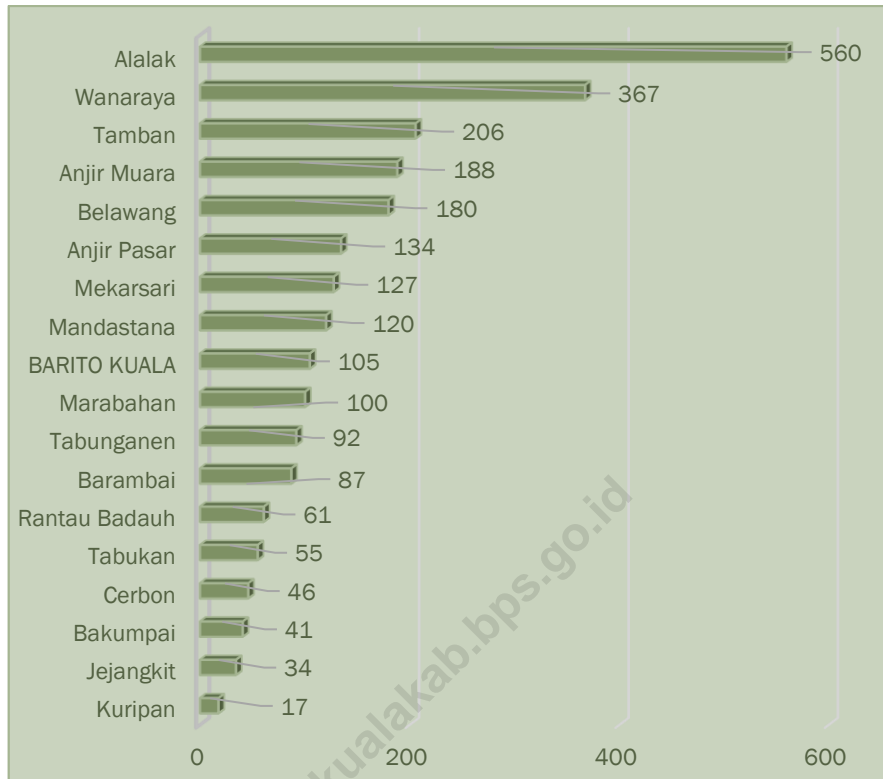
Gambar 2.2 Persentase Sebaran Penduduk Kabupaten Barito Kuala Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019

Berdasarkan Gambar 2.2, terlihat bahwa persebaran penduduk Kabupaten Barito Kuala terpusat pada beberapa kecamatan, diantaranya Kecamatan Alalak, Tamban, Anjir Muara, Tabunganen, dan Marabahan. Selain Kecamatan Alalak, Kecamatan Tamban juga memiliki populasi penduduk yang cukup besar, yaitu 10,78 persen dari total penduduk di

Kabupaten Barito Kuala. Diikuti oleh Kecamatan Marabahan, Tabunganen dan Anjir Muara dengan populasi masing-masing sebesar 7,04; 7,02 dan 7,01 persen dari total penduduk. Secara lebih jelas, gambar berikut menjelaskan persentase persebaran penduduk Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Wilayah Administrasi Kecamatan.

Alasan beberapa wilayah administrasi tersebut memiliki populasi penduduk yang cukup besar adalah selain wilayahnya yang cukup luas, letak geografis dari wilayah-wilayah tersebut juga berbatasan langsung dan relatif lebih dekat dengan Kota Banjarmasin dibandingkan kecamatan lain. Selain itu, akses menuju Provinsi Kalimantan Tengah dari Kota Banjarmasin juga melewati wilayah-wilayah tersebut, diantaranya Kecamatan Alalak dan Anjir Muara. Hal lain yang juga menjadi faktor pendukung banyaknya populasi khususnya di Kecamatan Alalak adalah banyaknya perumahan baru yang dibangun di wilayah ini. Adapun Kecamatan Marabahan yang juga memiliki populasi cukup besar dikarenakan wilayah ini merupakan Ibukota dari Kabupaten Barito Kuala yang terdapat pusat perekonomian dan pemerintahan di dalamnya.

Persebaran penduduk yang tidak merata perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan daya dukung terhadap lingkungan. Persebaran penduduk di Kabupaten Barito Kuala dapat dikatakan belum merata. Terdapat perbedaan tingkat kepadatan penduduk antar wilayah yang cukup signifikan antar kecamatan. Kepadatan penduduk Kabupaten Barito Kuala tahun 2019 sebesar 105 yang berarti bahwa setiap satu kilometer persegi dihuni sekitar 105 penduduk. Secara umum, kepadatan penduduk di kabupaten ini masih tergolong rendah. Terdapat 9 (sembilan) kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk dibawah nilai kepadatan penduduk kabupaten, yaitu Kecamatan Marabahan, Tabunganen, Barambai, Rantau Badauh, Tabukan, Cerbon, Bakumpai, Jejangkit, dan Kuripan. Untuk melihat gambaran lebih jelas, berikut disajikan grafik tingkat kepadatan penduduk per wilayah kecamatan.



Sumber: BPS Kabupaten Barito Kuala 2019

Gambar 2.3 Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Barito Kuala per Kecamatan Tahun 2019

Berdasarkan Gambar 2.3., jika dilihat dari segi kepadatan penduduk, Kecamatan Alalak juga merupakan wilayah yang memiliki nilai tertinggi yaitu sebesar 560 jiwa per km². Artinya, terdapat sekitar 560 jiwa yang tinggal di Kecamatan Alalak setiap satu kilometer persegi di tahun 2019. Letak kecamatan Alalak yang strategis, yaitu wilayah perbatasan dengan Kota Banjarmasin, menjadikan wilayah ini memiliki perkembangan yang jauh lebih pesat dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Barito Kuala. Ditunjang dengan akses ke fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai menjadikan kecamatan Alalak menjadi pilihan untuk tempat tinggal dan menetap. Bahkan Kecamatan Alalak bisa dianggap menjadi wilayah penyangga untuk Kota Banjarmasin dimana banyak penduduk yang setiap hari menjadi komuter untuk bekerja ataupun sekolah di Banjarmasin.

Sementara itu, wilayah dengan kepadatan penduduk terendah yaitu Kecamatan Kuripan yang ditinggali sekitar 17 jiwa per satu kilometer persegi. Jika dibandingkan kedua wilayah tersebut, secara luas wilayah Kecamatan Kuripan sembilan kali lebih luas dibandingkan Kecamatan Alalak, yaitu sebesar 343 km². Akan tetapi, penduduk yang tinggal di Kecamatan Kuripan jauh lebih sedikit dengan wilayah yang luas tersebut, karena keterbatasan akses jalan antar desa maupun akses menuju ibukota kabupaten yang sebagian besar menggunakan transportasi air.

2.3 Struktur dan Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin merupakan variabel penting dalam demografi. Hampir semua pembahasan mengenai masalah kependudukan melibatkan variabel umur dan jenis kelamin. Struktur umur penduduk antar satu daerah dengan daerah lainnya memiliki karakteristik yang berbeda. Struktur umur dipengaruhi oleh tiga variabel demografi yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi.

Analisis mengenai struktur umur penduduk sangat penting untuk perencanaan dalam segala bidang maupun dunia bisnis. Kebutuhan penduduk terhadap suatu pelayanan atau produk tertentu sangat bervariasi menurut umur. *Sex ratio* (rasio jenis kelamin) adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Nilai *sex ratio* diperoleh dengan menghitung jumlah penduduk laki-laki dibagi dengan jumlah penduduk perempuan dikali 100. Sehingga nilai *sex ratio* menunjukkan banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Jika nilai *sex ratio* lebih dari 100 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan *Sex Ratio* Per kelompok Umur di Kabupaten Barito Kuala, 2019

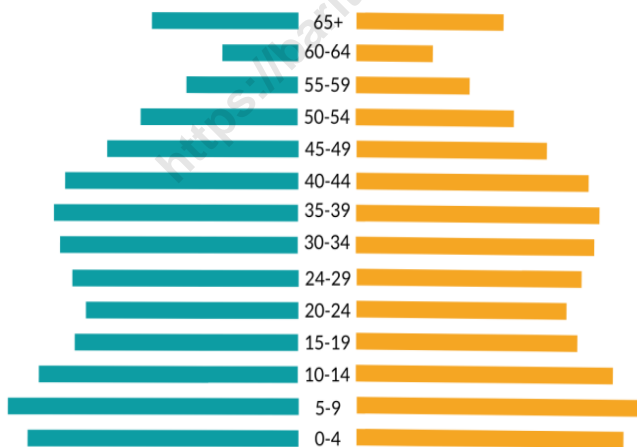
Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk	<i>Sex Ratio</i>
	Laki-Laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0-4	14 451	14 242	28 693	101.47
5-9	15 859	15 225	31 084	104.16
10-14	14 078	13 704	27 782	102.73
15-19	13 080	11 984	25 064	109.15
20-24	11 422	11 472	22 894	99.56
25-29	12 055	12 146	24 201	99.25
30-34	12 548	12 741	25 289	98.49
35-39	12 485	13 025	25 510	95.85
40-44	12 544	12 455	24 999	100.71
45-49	11 075	10 436	21 511	106.12
50-54	9 062	8 844	17 906	102.46
55-59	6 907	6 657	13 564	103.76
60-64	4 943	4 918	9 861	100.51
65+	6 924	8 313	15 237	83.29
Barito Kuala	157 433	156 162	313 595	100.81

Sumber: Proyeksi Penduduk, BPS Kabupaten Barito Kuala 2019

Berdasarkan Tabel 2.3., *sex ratio* Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2019 menunjukkan angka sebesar 100,81. Hal ini berarti bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 101 penduduk laki-laki. Penduduk Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2019 didominasi laki-laki pada kelompok usia muda (0 s.d. 19 tahun). Dimana pada kelompok usia ini, rasio jenis kelamin menunjukkan angka diatas 100 yang berarti lebih banyak penduduk laki-laki daripada perempuan. Sedangkan pada kelompok usia tua (65 tahun keatas), penduduk didominasi oleh penduduk perempuan. Dengan nilai *sex ratio* sebesar 83 menandakan bahwa dari 100 penduduk perempuan terdapat 83 penduduk laki-laki.

Hal ini menunjukkan bahwa harapan hidup perempuan lebih tinggi daripada laki-laki.

Perubahan pada struktur umur penduduk akan terlihat lebih jelas dengan menggunakan piramida penduduk. Piramida penduduk menggambarkan perkembangan penduduk pada setiap kelompok umur yang berbeda. Perubahan pada bentuk piramida penduduk akan dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, tingkat kelangsungan hidup setiap kelompok umur, serta proses perpindahan penduduk. Piramida penduduk menggambarkan komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Dari piramida tersebut akan diperoleh gambaran mengenai perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan, penduduk kelompok anak-anak, usia produktif, dan lansia. Piramida penduduk Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada Gambar 2.4. berikut.

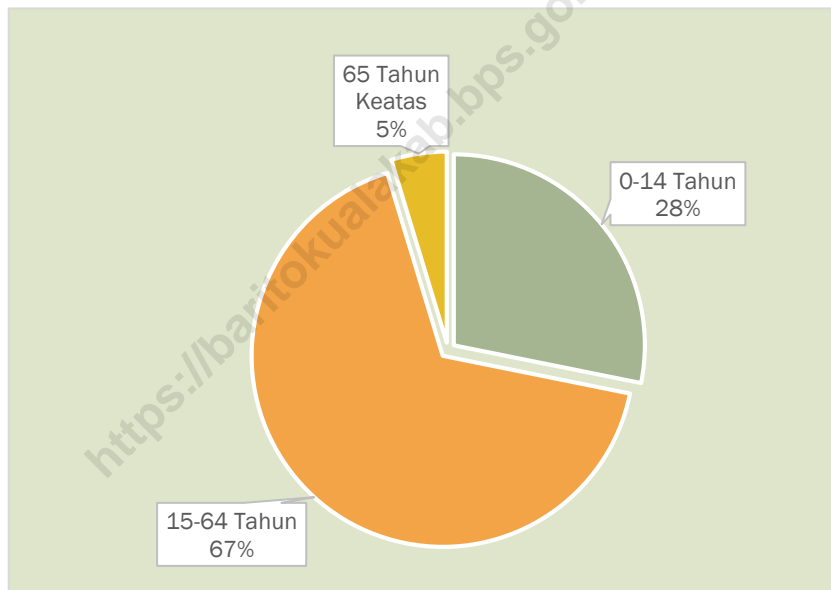


Sumber: Proyeksi Penduduk, BPS Kabupaten Barito Kuala 2019

Gambar 2.4 Piramida Penduduk Kabupaten Barito Kuala, 2019

Berdasarkan Gambar 2.4., piramida penduduk kabupaten Barito Kuala merupakan piramida penduduk muda (*expensive*) yang ditandai

dengan bagian dasar lebih lebar dari bagian puncaknya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda dan sedang mengalami pertumbuhan dengan tingkat kelahiran dan kematian yang relatif tinggi. Dengan struktur seperti ini, maka di masa yang akan datang penduduk Kabupaten Barito Kuala akan didominasi oleh penduduk muda. Dominasi penduduk usia muda ini akan menjadi keuntungan bagi pembangunan jika pemerintah bisa mengelola sumber daya ini dengan baik. Dalam arti menyediakan cukup pendidikan dan cukup lapangan pekerjaan.



Sumber: Proyeksi Penduduk, BPS Kabupaten Barito Kuala 2019

Gambar 2.5 Komposisi Penduduk Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019

Struktur umur penduduk dibagi menjadi kedalam tiga kelompok, yaitu 0 – 14 tahun, 15 – 64 tahun, dan 65 tahun keatas. Pada Tahun 2019, proporsi penduduk Kabupaten Barito Kuala pada kelompok umur 0 s.d. 14 tahun sebesar 27,92 persen, kelompok 15 s.d. 64 tahun sebesar

67,22 persen dan kelompok 65 tahun keatas sebesar 4,85 persen. Pembagian kelompok umur ini ditujukan untuk melihat rasio ketergantungan penduduk (*Dependency Ratio*).

Rasio ketergantungan didefinisikan sebagai jumlah orang yang tidak aktif secara ekonomi per 100 penduduk yang aktif secara ekonomi. Secara sederhana biasanya digunakan rasio antara penduduk kelompok umur 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas terhadap penduduk kelompok umur 15-64 tahun. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggung kehidupannya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Tingginya rasio ketergantungan akan menyita lebih banyak pendapatan yang dihasilkan oleh penduduk yang bekerja. Keluarga-keluarga yang mempunyai jumlah anak banyak cenderung tidak mampu untuk menabung, akibatnya tingkat penanaman modal akan rendah. Penduduk dengan beban tanggungan anak tinggi harus membagi dana investasi yang besar untuk penggunaan yang kurang produktif, misalnya untuk memenuhi konsumsi makanan dan non makanan dan bukan untuk investasi. Lebih jauh lagi, angka beban ketergantungan yang besar, akan memaksa pemerintah untuk lebih memprioritaskan penyediaan fasilitas sosial yang cukup besar daripada memperhatikan kualitasnya.

Tabel 2.4 Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019

Rasio Ketergantungan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Youth Dependency Ratio (YDR)</i>	41,82	41,24	41,53
<i>Old Dependency Ratio (ODR)</i>	6,52	7,94	7,22
<i>Dependency Ratio (DR)</i>	48,35	49,18	48,76

Sumber: Proyeksi Penduduk BPS Kabupaten Barito Kuala, 2019

Pada tahun 2019, rasio ketergantungan secara umum di Kabupaten Barito Kuala sebesar 48,76 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa sekitar dua orang penduduk usia produktif menanggung sebanyak satu orang penduduk yang belum/tidak produktif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat ketergantungan di Kabupaten Barito Kuala masih belum terlalu tinggi.

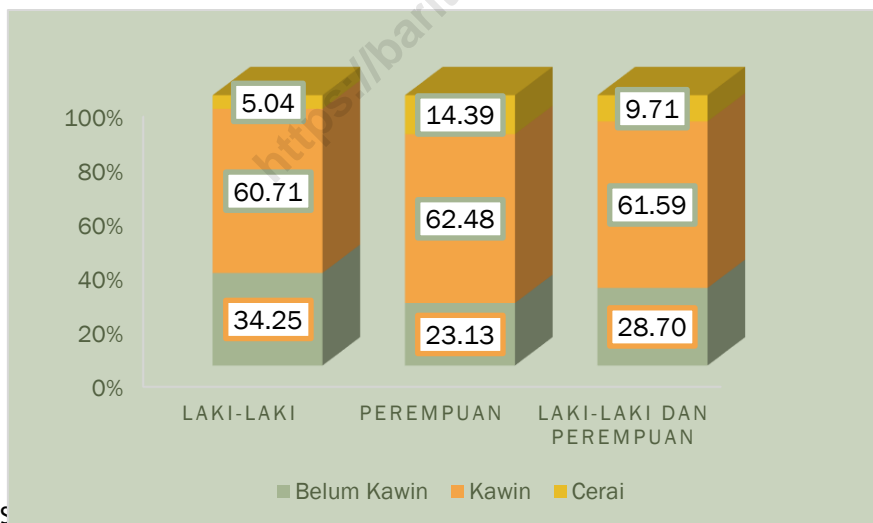
Nilai rasio ketergantungan anak (YDR) di Kabupaten Barito Kuala tahun 2019 sebesar 41,53 persen, yang berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 41 anak yang belum produktif. Angka tersebut menurun jika dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 41,94. Sementara itu, rasio ketergantungan lanjut usia (ODR) sebesar 6,98 persen menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar tujuh orang lanjut usia.

Untuk membandingkan struktur umur penduduk suatu wilayah yaitu apakah relatif lebih tua atau muda, maka secara cepat dapat digunakan umur median. Umur median dapat diartikan sebagai umur yang membagi tepat penduduk menjadi dua bagian yaitu di atas dan di bawah umur tersebut. Bila umur median kurang dari 20 tahun, maka penduduk di suatu wilayah dikategorikan sebagai penduduk muda. Sementara itu, umur median yang berada diantara 20-30 tahun dikategorikan sebagai penduduk *intermediate*. Sedangkan umur median

yang berada di atas 30 tahun, dikategorikan sebagai penduduk tua. Dengan perkataan lain, semakin tinggi umur median penduduk suatu wilayah, maka semakin tua struktur umur penduduknya. Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019, penduduk di Kabupaten Barito Kuala tergolong sebagai penduduk *intermediate* dengan nilai umur median terdapat di kisaran 25-29 tahun.

2.4 Fertilitas Penduduk dan Keluarga Berencana

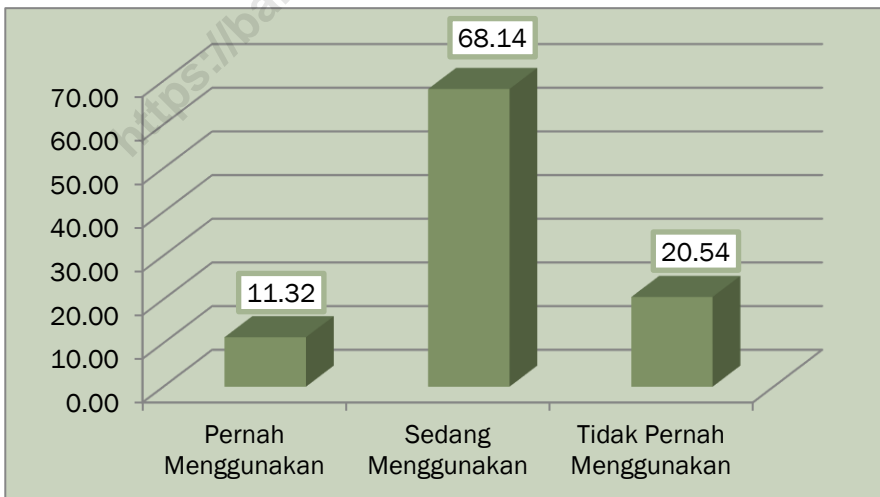
Fertilitas (kelahiran) merupakan salah satu komponen perubahan jumlah penduduk disamping mortalitas (kematian) dan migrasi (perpindahan). Angka fertilitas yang tinggi apabila disertai dengan angka mortalitas yang rendah akan menyebabkan penambahan penduduk. Angka fertilitas yang tidak terkendali akan menyebabkan terjadinya ledakan penduduk. Ledakan penduduk yang besar akan memunculkan berbagai permasalahan sosial ditengah kehidupan bermasyarakat.



Gambar 2.6 Persentas Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Barito Kuala, 2019

Seiring bertambahnya jumlah penduduk maka beban negara menjadi semakin dan berisiko menghambat pembangunan. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) salah satunya mendapatkan data status perkawinan dan jenis kelamin, sehingga dapat dilihat persentase penduduk perempuan yang berusia 10 tahun keatas yang sudah kawin. Berdasarkan Gambar 2.5., hasil Susenas 2019 mencatat bahwa persentase perempuan di Kabupaten Barito Kuala yang berstatus kawin sebesar 62,48 persen. Persentase wanita yang berstatus kawin di tahun 2019 meningkat sebesar 0,24 persen jika dibandingkan kondisi di tahun 2018 yang nilainya mencapai 62,17 persen. Semakin besar persentase wanita berstatus kawin semakin besar peluang untuk melahirkan anak. Hal ini sejalan dengan jumlah penduduk yang meningkat 1,15 persen di tahun 2019 jika dibandingkan tahun 2018.

Penggunaan alat KB merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu.



Sumber: Susenas 2019, BPS Kabupaten Barito Kuala

Gambar 2.7 Persentase Penduduk Perempuan Usia 15 s.d 49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Status Keikutsertaan KB Kabupaten Barito Kuala, 2019

Program KB dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi/KB yang berbagai jenis/macamnya. Meningkatnya cakupan akseptor KB diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan penduduk. Seperti yang terlihat pada Gambar 2.7., berdasarkan data Susenas tahun 2019, dari seluruh penduduk perempuan berusia 15 s.d. 49 tahun berstatus pernah kawin dan menjadi peserta KB aktif ada 68,14 persen. Jika dibandingkan dengan persentasi wanita yang menjadi peserta KB aktif di tahun 2017 yaitu sebesar 69.87 persen, kondisi di tahun 2019 meningkat menurun 2,5 persen. Gambar 2.7. juga menunjukkan bahwa masih ada wanita usia subur yang tidak pernah menggunakan alat KB sebesar 20 persen, meningkat dari tahun 2018 yang nilainya sebesar 14 persen. Usaha pemerintah melalui program KB harus terus diupayakan pengendalian pertumbuhan penduduk di Barito Kuala.



BAB III

KESEHATAN

<https://barangkab.go.id>



<https://baritokualakab.bps.go.id>

BAB III

KESEHATAN

Kesehatan merupakan salah satu komponen utama dan penting dalam pembahasan kualitas hidup dan kesejahteraan suatu wilayah. Begitu pentingnya kesehatan dalam menentukan kesejahteraan, indikator kesehatan dijadikan beberapa tujuan dan target yang ingin dicapai pada *Millennium Development Goals*, antara lain Menurunkan angka kematian balita sebesar dua pertiganya antara 1990 dan 2019; Menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga perempatnya antara 1990 dan 2019; Mencapai dan menyediakan akses kesehatan reproduksi untuk semua pada 2019; dst.

Pembangunan di bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Tujuan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan mutu, pemerataan dan terjangkaunya pelayanan kesehatan sampai wilayah pelosok yang didukung oleh peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku hidup sehat di masyarakat. Keseriusan pemerintah pun ditunjukkan dengan semakin besarnya alokasi anggaran untuk bidang kesehatan. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang dan meningkatkan angka harapan hidup.

Upaya pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata dan terjangkau. Bentuk realisasinya antara lain:

memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin melalui program Jaminan Kesejahteraan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesejahteraan Daerah (Jamkesda); menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan yang merata; meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan Polindes, Poskesdes, Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas, dan rumah sakit; menyediakan obat-obatan yang terjangkau bagi masyarakat.

Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain Angka Harapan Hidup, Angka Kesakitan, persentase penolong kelahiran yang dilakukan oleh tenaga medis, lamanya bayi disusui, pemberian imunisasi, dan lain sebagainya.

3.1 Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran pembangunan kesehatan adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan yang semakin menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat ini juga menjadi salah satu ukuran tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Semakin baik derajat kesehatan penduduk di suatu wilayah, mengindikasikan semakin baik pula tingkat kesejahteraannya. Demikian pula sebaliknya, derajat kesehatan masyarakat yang buruk, mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraannya juga relatif rendah.

Indikator yang digunakan untuk menentukan derajat kesehatan penduduk adalah angka kesakitan/morbiditas (*morbidity rate*) dan rata-rata lama sakit. Angka kesakitan merupakan persentase penduduk yang mengalami keluhan dan menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari pada periode sebulan terakhir sebelum pencacahan. Rata-rata lama sakit merupakan rata-rata lama hari penduduk menderita keluhan kesehatannya. Keluhan kesehatan tersebut antara lain, panas, batuk, pilek,

asma/sesak nafas, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, ataupun keluhan kesehatan lainnya seperti lumpuh, pikun, stroke, mata katarak, dll.

Tabel 3.1 Angka Morbiditas Kabupaten Barito Kuala Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2019

Indikator	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Morbiditas	16,79	19,81	18,30

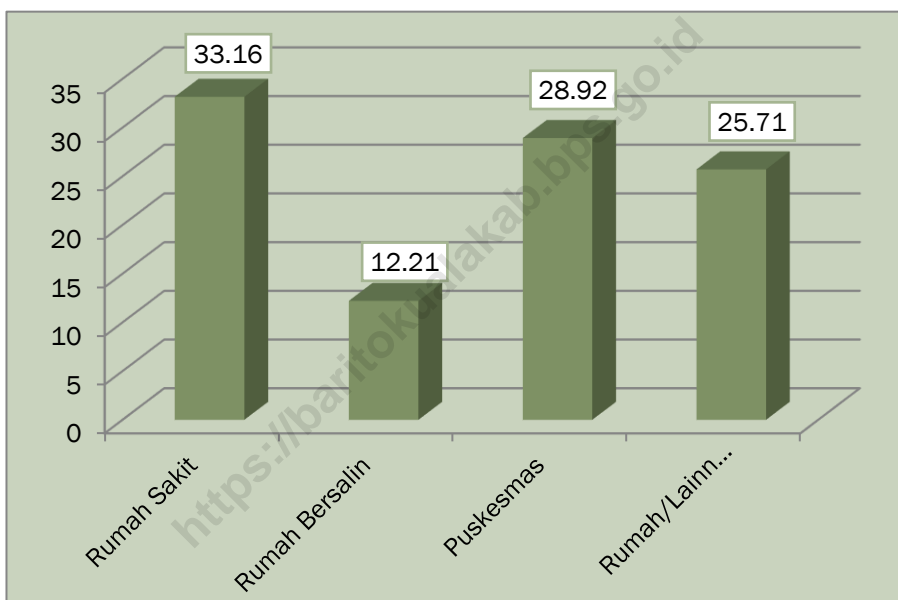
Sumber : Hasil Susenas 2019, BPS Kabupaten Barito Kuala

Angka Morbiditas Kabupaten Barito Kuala tahun 2019 sebesar 18,30 persen, yang berarti bahwa dari 100 orang penduduk ada 18 s.d. 19 penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan aktivitas sehari-harinya terganggu akibat keluhan tersebut. Angka kesakitan untuk penduduk perempuan di tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki.

3.2 Kesehatan Balita

Balita (bayi dibawah lima tahun) merupakan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Pada masa balita ini merupakan usia emas (*Golden Age*) tumbuh kembang anak sehingga kecukupan asupan gizi dan kesehatannya harus terpenuhi untuk menjadikannya manusia yang berkualitas di kemudian hari. Perhatian terhadap kesehatan balita harus dimulai sejak dalam kandungan, proses melahirkan dan proses menyusui. Proses persalinan berkaitan erat dengan keselamatan bayi yang dilahirkan dan sang ibu yang melahirkan. Penanganan yang tepat oleh tenaga penolong kelahiran yang berkualitas merupakan hal penting untuk mengurangi risiko kematian.

Salah satu target MDGs di bidang kesehatan yaitu menurunkan angka kematian bayi dan kematian ibu. Cakupan persalinan yang tinggi dan memenuhi standar merupakan indikator pendekatan (*proxy*) dari angka kematian bayi. Untuk mempercepat pencapaian target MDGs, Kementerian Kesehatan menetapkan kebijakan bahwa semua persalinan harus dilakukan oleh tenaga terlatih dan memulai Program Jaminan Persalinan (Jampersal), yaitu paket program yang mencakup pelayanan antenatal, persalinan, postnatal dan keluarga berencana.



Sumber : Hasil Susenas 2019, BPS Kabupaten Barito Kuala

Gambar 3.1 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Menurut Tempat Melahirkan, 2019

Berdasarkan hasil Susenas 2019, jumlah perempuan pernah kawin yang melahirkan di fasilitas kesehatan (Rumah Sakit Pemerintah/Swasta, Puskesmas, atau Tempat Praktek Tenaga Kesehatan) mencapai 74,29 persen dengan rincian seperti yang terlihat pada Gambar 3.1. Angka ini meningkat 9,71 poin jika dibandingkan tahun 2018 yang nilainya sebesar 64,57 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa akses menuju fasilitas kesehatan di Barito Kuala relatif lebih mudah jika dibandingkan tahun

sebelumnya. Sementara itu, keterbatasan biaya, kebiasaan setempat, dan jauhnya akses terhadap fasilitas kesehatan di beberapa wilayah di Barito Kuala diduga menjadi faktor penyebab masih adanya pemanfaatan tempat melahirkan bukan fasilitas kesehatan seperti di rumah atau tempat lainnya. Hal tersebut terlihat dari tempat melahirkan rumah/lainnya yang nilainya mencapai 25,71 persen di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2019.

Selain menurunkan angka kematian bayi dan kematian ibu, Salah target lain dari MDGs di bidang kesehatan adalah menurunkan anak yang lahir dengan berat badan rendah yaitu yang lahir dengan berat badan dibawah 2,5 kilogram. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2019 menghasilkan salah satu indikator yaitu berat lahir bayi dari perempuan yang melahirkan selama dua tahun terakhir.

Tabel 3.2 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Dua Tahun Terakhir Menurut Karakteristik dan Berat Badan Bayi yang Dilahirkan Terakhir, 2019

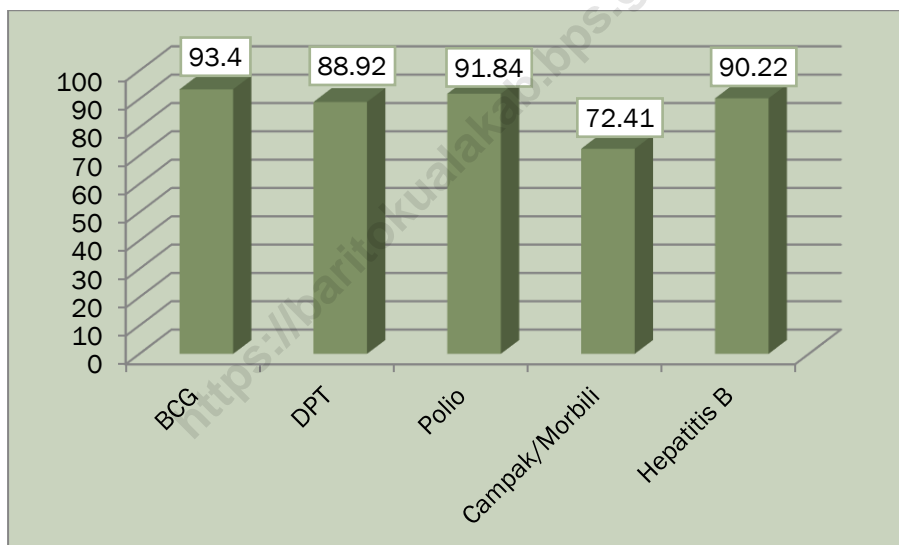
Indikator	< 2,5 kg	>= 2,5 kg	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
SD ke bawah	20,91	79,09	100
SMP ke atas	7,34	92,66	100
Barito Kuala	12,23	87,77	100

Sumber : Hasil Susenas 2019, BPS Kabupaten Barito Kuala

Berdasarkan Tabel 3.2., dapat dilihat bahwa di Kabupaten Barito Kuala, terdapat 12,23 persen bayi yang lahir dibawah berat badan rendah (<2,5 kg) pada tahun 2019. Sementara itu, jika dilihat berdasarkan pendidikan ibu, persentase bayi lahir dibawah berat badan rendah dari ibu yang berpendidikan SD kebawah lebih tinggi daripada ibu yang menepuh

pendidikan SMP ke atas. Kondisi tersebut kemungkinan terjadi karena ibu yang berpendidikan lebih tinggi memiliki pemahaman yang relatif lebih baik dibandingkan ibu yang berpendidikan SD kebawah. Mereka yang berpendidikan relatif tinggi cenderung lebih terbuka akan informasi sehingga bisa lebih menjaga untuk mencegah berbagai masalah kehamilan yang dapat mempengaruhi berat badan bayi saat lahir.

Dari segi kesehatan anak, pencegahan penyakit sejak usia dini dapat dilakukan dengan cara memberikan imunisasi pada balita. Imunisasi adalah pemberian suatu vaksin dalam tubuh seseorang dengan maksud meningkatkan kekebalan daya tahan tubuhnya terhadap penyakit tertentu.



Sumber : Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka 2019

Gambar 3.3 Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Pernah Mendapat Imunisasi menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019

Terdapat dua jenis imunisasi yaitu imunisasi aktif dan imunisasi pasif. Imunisasi pasif merupakan kekebalan bawaan pada anak sejak lahir sedangkan imunisasi aktif adalah kekebalan yang didapatkan dari pemberian vaksin kepada anak melalui suntik atau tetes. Imunisasi harus

diberikan secara lengkap sesuai dengan umur anak. Anak yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari berbagai penyakit. Jenis imunisasi yang wajib diberikan kepada balita adalah BCG, DPT, Campak/morbili, dan Hepatitis B.

Berdasarkan Gambar 3.8, terdapat 93,40 persen balita yang pernah mendapatkan imunisasi BCG, meningkat 8,23 poin dari tahun 2018 yang nilainya sebesar 85,17 persen. Sementara itu, pencapaian pemberian imunisasi ke Balita untuk imunisasi DPT dan Polio masing-masing sebesar 88,92 persen dan 91,84 persen. Sedangkan untuk imunisasi campak/morbili hanya 72,4 persen dan hepatitis B sebesar 90,22 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat Balita di Barito Kuala yang belum mendapatkan imunisasi jenis tertentu. Untuk campak/morbili misalnya, masih terdapat sekitar 27 s.d. 28 balita dari 100 balita yang belum mendapatkan vaksin campak/morbili. Begitu pula untuk jenis vaksin DPT, dari 100 balita di Kabupaten Barito Kuala, masih terdapat sekitar 12 s.d. 13 balita yang belum mendapatkan vaksin tersebut di tahun 2019.

<https://baritokualakab.bps.go.id>



BAB IV

PENDIDIKAN



<https://bal...s-go.id>

BAB IV

PENDIDIKAN

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan yang cukup penting dalam pembangunan ekonomi. Paling tidak ada dua alasan mengapa pemerintah menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai isu pokok dalam pembangunan nasional bersama-sama dengan isu pembangunan ekonomi. Pertama, pendekatan pertumbuhan ekonomi nampaknya kurang berhasil dalam mengurangi tingkat kemiskinan absolut maupun relatif. Sebaliknya, pendekatan pembangunan sumber daya manusia menjanjikan adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh pemerataan pendapatan. Kedua, pada era globalisasi saat ini keberhasilan suatu bangsa di ajang internasional tidak lagi ditentukan oleh keunggulan komparatif seperti kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, akan tetapi akan lebih ditentukan oleh keunggulan kompetitif, yang dalam hal ini akan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Karenanya pendidikan sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi instrumen yang sangat penting untuk diperhatikan.

Peningkatan kualitas SDM bertitik tolak pada upaya pembangunan bidang pendidikan. Melalui pendidikan diharapkan akan terbentuk SDM yang berkualitas bagi pembangunan. Mengenai pentingnya pendidikan telah banyak dikupas dalam teori yang cukup terkenal, yaitu *Human Capital Theory*. Teori ini berangkat dari suatu anggapan bahwa seseorang dapat meningkatkan pendapatannya melalui peningkatan pendidikan. Pendidikan juga dapat meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia.

Besarnya peranan pendidikan dalam menentukan kualitas SDM mendorong pemerintah untuk terus berupaya mencari terobosan agar mutu dan kualitas pendidikan dapat ditingkatkan. Sejak tahun 1970-an

pemerintah Indonesia mulai memperlihatkan perhatiannya secara lebih terencana terhadap bidang pendidikan. Alokasi dana pendidikan selalu mengalami peningkatan setiap tahun anggaran. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengembangkan pendidikan di Indonesia, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Demikian pula partisipasi masyarakat dalam pendidikan terus meningkat. Kesemuanya itu berangkat dari kesadaran akan pentingnya pendidikan baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Bagi pemerintah, keuntungan yang akan diperoleh dari investasi di bidang pendidikan antara lain sebagai salah satu cara untuk memerangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan, dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Sedangkan bagi masyarakat, pendidikan yang semakin baik merupakan modal dalam memperebutkan kesempatan kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan mereka.

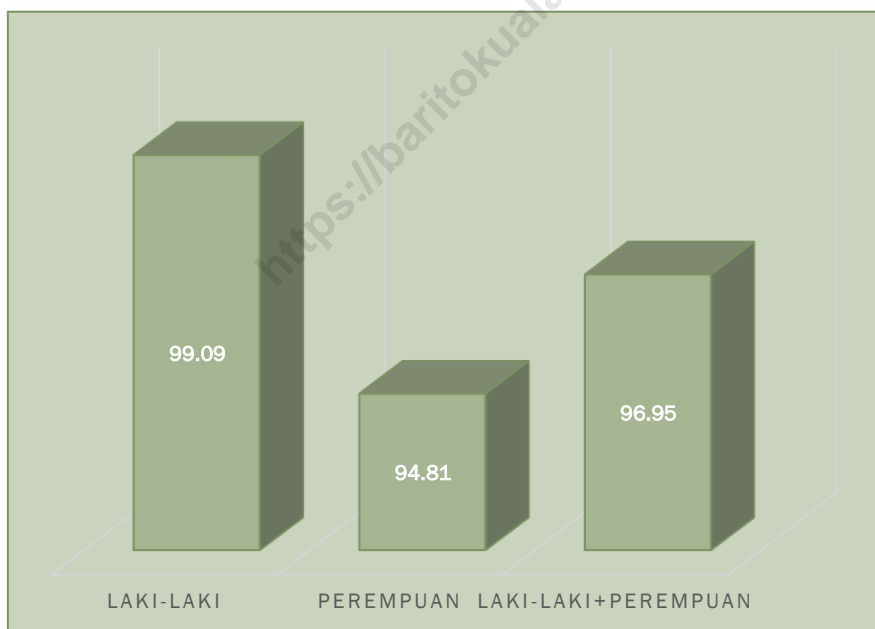
Pendidikan merupakan salah satu komponen dari indikator kesejahteraan rakyat yang harus mendapatkan perhatian sangat serius. Semakin baik tingkat pendidikan penduduk, maka semakin baik pula kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengetahui sampai sejauh mana perkembangan pembangunan pendidikan di Kabupaten Barito Kuala, maka pada bab ini akan diuraikan mengenai keadaan pendidikan penduduk Kabupaten Barito Kuala melalui pendekatan indikator-indikator pendidikan seperti Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator-indikator tersebut di olah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan oleh BPS.

4.1 Angka Melek Huruf

Pada tingkat makro, salah satu ukuran mendasar yang digunakan untuk menilai keberhasilan pendidikan adalah kemampuan baca tulis penduduk. Penduduk harus mempunyai kemampuan untuk membaca dan menulis agar dapat menerima berbagai informasi secara tertulis, berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan, dan dapat menikmati

hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu, kemampuan membaca dan menulis yang dicerminkan oleh indikator melek huruf merupakan keterampilan minimum yang dibutuhkan oleh penduduk agar dapat menggapai hidup sejahtera.

Seseorang dikatakan melek huruf apabila orang tersebut dapat membaca dan menulis baik menggunakan huruf latin dan/atau huruf arab dan/atau huruf lainnya seperti aksara jawa, kanji, dll. Semakin meningkatnya angka melek huruf berarti semakin menurunnya angka buta huruf. Baik Angka Melek Huruf (AMH) maupun Angka Buta Huruf dapat digunakan untuk melihat pencapaian keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf. Angka melek huruf merupakan perbandingan banyaknya penduduk 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis terhadap jumlah penduduk 15 tahun ke atas.



Sumber : Susenas 2019, BPS Kabupaten Barito Kuala

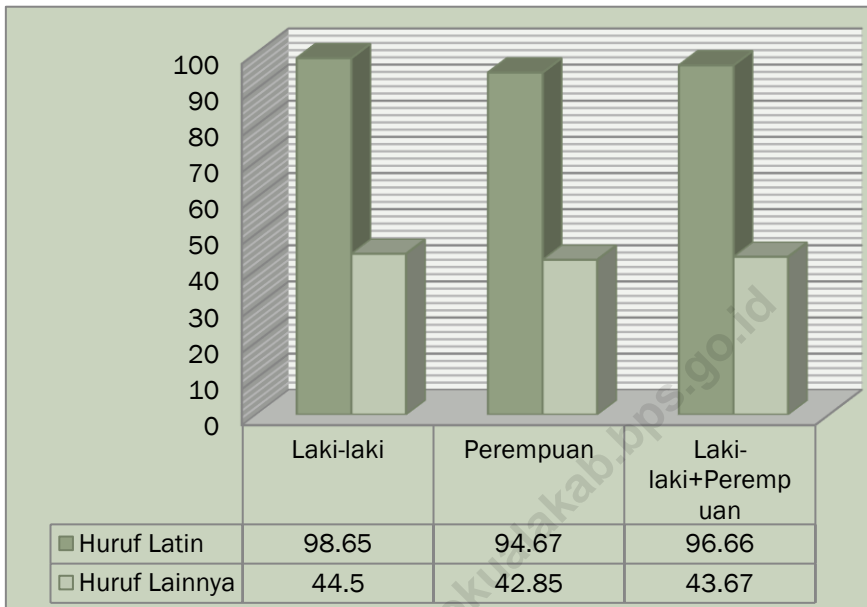
Gambar 4.1 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019

Berdasarkan Gambar 4.1., pencapaian angka melek huruf Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2019 adalah sebesar 96,95 persen. Angka ini menurun jika dibandingkan angka melek huruf tahun 2018 yang nilainya sebesar 97,89 persen. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 96,95 persen penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Barito Kuala yang sudah bisa membaca dan menulis baik huruf latin, arab ataupun huruf lainnya. Dengan kata lain, dapat dikatakan juga bahwa dari 100 orang penduduk usia 15 tahun keatas, 3 s.d. 4 orang diantaranya tidak bisa baca tulis baik huruf latin, arab, maupun huruf lainnya.

Kemampuan membaca dan menulis merupakan hak dasar kebutuhan manusia. Target *Millineum Development Goals* (MDGs) menetapkan tercapainya 50 persen peningkatan angka melek huruf orang dewasa pada tahun 2019, dengan penekanan khusus pada kemampuan membaca dan menulis bagi perempuan. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, AMH untuk perempuan lebih rendah dibandingkan AMH laki-laki. Pada tahun 2019, AMH laki-laki mencapai 99,26 persen, artinya dari 100 laki-laki berusia 15 tahun keatas, terdapat sekitar 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dapat membaca dan menulis. Sedangkan AMH perempuan pada tahun yang sama sebesar 94,81 persen, berarti bahwa 5 s.d. 6 orang perempuan dari 100 orang perempuan berusia 15 tahun keatas tidak bisa baca tulis baik huruf latin, arab, maupun huruf lainnya.

Selain dapat dilihat angka melek huruf secara umum, jika dilihat berdasarkan kategori jenis hurufnya, AMH huruf latin sebesar 96.66 persen. Angka ini menunjukkan sekitar 97 dari 100 penduduk Kabupaten Barito Kuala dapat membaca tulisan latin, sementara sisanya tidak dapat membaca huruf latin. Lebih lanjut, penduduk laki-laki lebih banyak yang dapat membaca dan menulis huruf latin dibandingkan penduduk perempuan. Sementara itu, untuk kemampuan membaca dan menulis huruf lainnya (termasuk huruf arab dan huruf lainnya), terdapat sekitar 43 dari 100 penduduk di Kabupaten Barito Kuala dapat membaca dan menulis huruf lainnya. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, kemampuan

membaca dan menulis huruf lainnya penduduk laki-laki juga lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan.



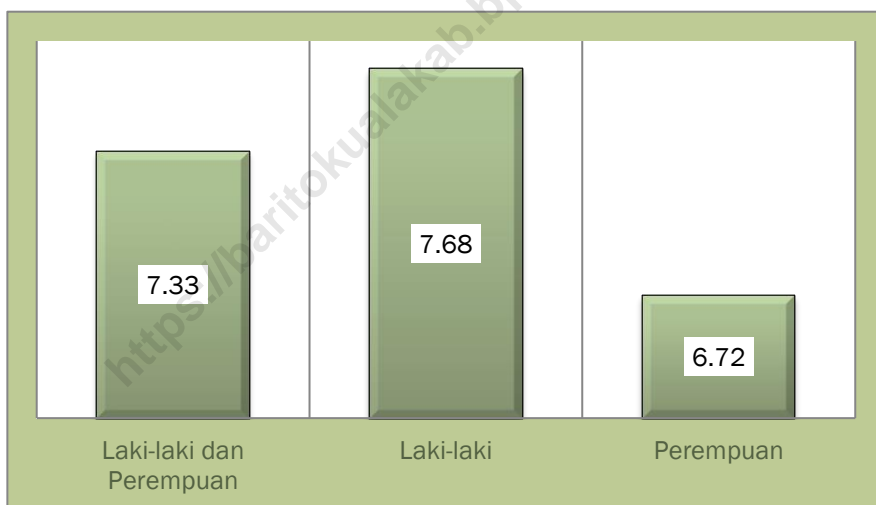
Sumber : Susenas 2019, BPS Kabupaten Barito Kuala

Gambar 4.2 Kemampuan Membaca dan Menulis Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019

Masih rendahnya angka melek huruf perempuan dibandingkan laki-laki menunjukkan bahwa kesempatan perempuan mendapatkan pendidikan masih relatif lebih rendah. Penduduk perempuan 15 tahun keatas yang tidak bisa membaca dan menulis berada kebanyakan berada pada kelompok usia 50 tahun keatas. Memang agak sulit untuk menerapkan program pemberantasan buta huruf terhadap penduduk yang sudah berumur, diperlukan kesadaran dan peran aktif dari yang bersangkutan untuk mengikuti program keaksaraan fungsional yang terus dikembangkan oleh pemerintah.

4.2 Rata-rata Lama Sekolah

Indikator pendidikan lain yang bisa melihat mutu sumber daya manusia adalah rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah (*Means Years School*) menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun keatas di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalannya. Semakin lama sekolah yang dilalui diharapkan semakin bagus kualitas dan keterampilan yang dimiliki. Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu komponen dalam penghitungan indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index-HDI*) dan maksimum lama sekolah yang harus dicapai adalah 25 tahun atau paling tidak penduduk telah menamatkan suatu jenjang akademi.



Sumber : Susenas 2019, BPS Kabupaten Barito Kuala

Gambar 4.3 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Penduduk Usia 25 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019

Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas pada tahun 2019 sebesar 7,33 tahun. Hal ini berarti bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas yang tinggal di Kabupaten Barito Kuala baru mampu menempuh pendidikan sampai 7 tahun atau setara dengan kelas 1 (satu)

SMP saja dan putus sekolah dikelas 2 (dua) SMP. Sementara itu, jika dilihat berdasarkan jenis kelamin rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki (7,68 tahun) lebih tinggi dari penduduk perempuan (6,72 tahun). Dengan kata lain, penduduk laki-laki berusia 25 tahun ke atas mampu menyelesaikan pendidikan sampai kelas 1 (satu) SMP sedangkan perempuan hanya sampai kelas 6 (enam) SD saja.

4.3 Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian/keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari status pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, seseorang diharapkan memiliki pengetahuan serta kemampuan dan keahlian yang lebih baik. Meningkatnya keterampilan seseorang akan meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah.

Berdasarkan Tabel 4.1., pada tahun 2019, penduduk usia 7-24 tahun yang masih bersekolah di jenjang SD/Sederajat mencapai 40,00 persen secara total. Jika dilihat berdasarkan karakteristik, persentase penduduk laki-laki (42,24 persen) yang masih bersekolah di jenjang SD/Sederajat lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan (37,66 persen). Selanjutnya, penduduk yang masih bersekolah untuk jenjang SMP/Sederajat sebesar 14,37 persen secara keseluruhan. Sementara itu, penduduk yang masih bersekolah di jenjang SMA/keatas sebesar 15,76 persen. Secara total, penduduk usia 7-24 tahun yang masih bersekolah di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2019 sebesar 70,24 persen, sementara sisanya sebanyak 29,76 persen sudah tidak bersekolah lagi, yaitu mereka yang sudah lulus SMA/keatas dan mereka yang putus sekolah baik di jenjang SD, SMP, maupun SMA/keatas.

Tabel 4.1 Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun Menurut Karakteristik dan Status Pendidikan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019

Status Pendidikan	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki dan Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Masih Bersekolah	71,41	69,02	70,24
SD/Sederajat	42,24	37,66	40,00
SMP/Sederajat	14,97	13,76	14,37
SMA/keatas	13,99	17,60	15,76
Tidak Bersekolah Lagi	28,59	30,98	29,76
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2019, BPS Kabupaten Barito Kuala

Persentase penduduk 7-24 tahun yang masih bersekolah lebih di jenjang SD/Sederajat dan SMP/Sederajat lebih banyak berjenis kelamin laki-laki, sementara pada jenjang SMA/keatas lebih banyak penduduk perempuan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa mereka yang cenderung tidak melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan SMA/keatas lebih banyak berjenis kelamin laki-laki.

4.4 Tingkat Partisipasi

Tingkat partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Ukuran tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak serta merta dapat diartikan sebagai

semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Indikator tingkat partisipasi sekolah dapat digunakan untuk mengukur proporsi keikutsertaan anak pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka ini memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak yang menerima pendidikan pada jenjang tertentu. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Peningkatan kedua indikator tersebut setiap tahunnya menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan berkesetaraan.

Tabel 4.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal dan Non Formal Penduduk Berumur 7 s.d. 18 Tahun menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019

Jenis Kelamin	APS		
	7 – 12	13 – 15	16 – 18
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	98,75	97,30	71,16
Perempuan	99,98	99,13	76,41
Laki-laki dan Perempuan	99,31	98,11	73,93

Sumber : Susenas 2019, BPS Kabupaten Barito Kuala

Pembangunan di bidang pendidikan bertujuan meningkatkan akses penduduk pada fasilitas pendidikan, sehingga diharapkan makin banyak penduduk yang dapat bersekolah. Pembangunan pendidikan di Barito Kuala telah menunjukkan keberhasilan yang cukup besar. Wajib Belajar 6 tahun yang didukung pembangunan infrastruktur sekolah dan diteruskan dengan Wajib Belajar 9 tahun adalah program sektor pendidikan yang diakui cukup sukses dimana standar program wajib belajar dikatakan berhasil jika nilai Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD lebih dari 95 persen dan APS SMP lebih dari 70 persen. Pada tahun 2019, APS usia 7-12 tahun mencapai 99,31 persen. Angka tersebut berarti bahwa sebanyak 99,31 persen penduduk usia 7 s.d. 12 tahun (usia SD) sedang menjalani pendidikan atau masih bersekolah. Sementara itu, APS untuk usia 13-15 tahun (usia SMP) mencapai 98,11 persen yang berarti bahwa terapat 1 s.d. 2 orang dari 100 penduduk usia 13 s.d. 15 tahun yang tidak bersekolah pada tahun 2019. Sedangkan APS pada kelompok usia 16 s.d. 18 tahun sudah cukup baik yaitu sebesar 73,93 persen. Meskipun Program Wajib Belajar 9 tahun sudah dapat dikatakan berhasil, namun Data Susenas 2019 menunjukkan semakin tinggi kelompok umur tersebut semakin kecil persentase mereka yang bersekolah. Hal ini perlu ditinjau lebih jauh mengapa mereka tidak bersekolah lagi terutama untuk kelompok umur 16-18 tahun dalam rangka menyukseskan Program Pendidikan 12 tahun.

Berdasarkan data Tabel 4.2., jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, APS perempuan pada kelompok umur 7 s.d. 12 tahun, 13 s.d. 15 tahun dan 16 s.d. 18 tahun selalu lebih besar dari APS laki-laki pada tahun 2019. Kesenjangan yang cukup besar antara APS laki-laki (71,16 persen) dan APS perempuan (76,41 persen) terjadi pada kelompok umur 16 s.d. 18 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk perempuan lebih cenderung melanjutkan sekolah sampai jenjang yang lebih tinggi.

Indikator pendidikan penting lainnya untuk melihat penyerapan penduduk usia sekolah oleh sektor pendidikan adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM menyatakan banyaknya penduduk usia sekolah yang

masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai. Pada APM usia anak sekolah di setiap jenjang pendidikan sangat diperhatikan. Hal ini dimaksudkan untuk mengungkapkan banyaknya anak yang sekolah diluar sistem pendidikan seperti menunda saat mulai sekolah, murid tidak naik kelas, berhenti/keluar dari sekolah sementara waktu, dan lulus lebih awal. Indikator ini sudah memperhitungkan usia standar seorang anak dalam menempuh pendidikan, usia 7 s.d. 12 tahun untuk sekolah SD sederajat, 13 s.d. 15 tahun untuk SMP sederajat dan 16 s.d. 18 tahun untuk SMA sederajat. Misal APM siswa SD adalah angka yang membandingkan jumlah anak usia 7 s.d. 12 tahun yang masih bersekolah di SD dengan jumlah penduduk usia 7 s.d. 12 tahun.

Tabel 4.3 Angka Partisipasi Murni (APM) Formal dan Non Formal Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Barito Kuala tahun 2019

Jenis Kelamin	APM		
	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	98,75	73,93	58,83
Perempuan	98,79	78,79	64,01
Barito Kuala	98,77	76,08	61,56

Sumber : Susenas 2019, BPS Kabupaten Barito Kuala

Berdasarkan Data Susenas 2019 pada Tabel 4.3, APM SD sebesar 98,77 persen yang berarti bahwa dari 100 anak usia 7 s.d 12 tahun terdapat sekitar 2 anak yang tidak bersekolah atau sudah tidak duduk di bangku SD. APM SD untuk anak perempuan sedikit lebih tinggi daripada APM SD anak laki-laki. APM SD perempuan sebesar 98,79 persen menunjukkan bahwa 98 dari 100 anak perempuan usia 7 s.d 12 tahun sedang menempuh pendidikan SD/ sederajat.

Pada tingkat SMP sederajat, APM perempuan juga lebih tinggi dibandingkan dengan APM laki-laki. Persentase penduduk laki-laki usia 13 s.d. 15 tahun dan sedang bersekolah di tingkat SMP sederajat sebesar 73,93 persen, sedangkan APM perempuan sebesar 78,79 persen. Hal yang sama terjadi juga pada APM SMA/sederajat. APM SMA perempuan mencapai 64,01 persen sedangkan APM SMA laki-laki hanya 58,83 persen saja. Seperti halnya APS, Angka Partisipasi Murni (APM) juga cenderung menurun untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, semakin tinggi jenjang pendidikan semakin besar kesenjangan antara APM laki-laki dengan APM perempuan. Penduduk perempuan cenderung memiliki APM lebih tinggi di semua jenjang pendidikan.



BAB V

KETENAGAKERJAAN

<https://balekambang.go.id>

BAB V

KETENAGAKERJAAN

Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu komponen penggerak roda pembangunan perekonomian nasional. Khususnya dalam upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Titik sentral pembangunan di bidang ketenagakerjaan adalah perencanaan tenaga kerja yang mencakup: 1) penyusunan program penyediaan tenaga profesional untuk memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan usaha atau kegiatan pembangunan yang direncanakan; 2) penyusunan program penciptaan kesempatan kerja supaya dapat menggunakan sumber daya manusia secara optimal; 3) terciptanya lapangan kerja baik dalam jumlah dan kualitas yang memadai.

Dalam merencanakan pembangunan yang berhubungan dengan penggunaan tenaga kerja, diperlukan suatu perencanaan tenaga kerja (*manpower planning*) yang tepat. Suatu daerah harus bisa memperkirakan jumlah tenaga kerja sesuai dengan kualitas tenaga kerja dan keperluan sektoral minimal sampai dengan lima tahun mendatang. Kalau disebut tentang kualitas tenaga kerja, hal ini berhubungan dengan apa yang disebut sebagai "*human capital*". Ciri khusus yang dimiliki oleh faktor produksi ini adalah jika sering dipakai mereka tidak akan hilang atau berkurang. Dengan semakin sering faktor produksi ini dipakai bukan kadarnya semakin berkurang tetapi justru sebaliknya dan bahkan nilainya menjadi semakin tinggi pula. Identifikasi dan kuantifikasi dalam pasar tenaga kerja seperti underutilisasi tenaga kerja dan defisit pekerjaan yang layak (*decent work*) adalah langkah pertama dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

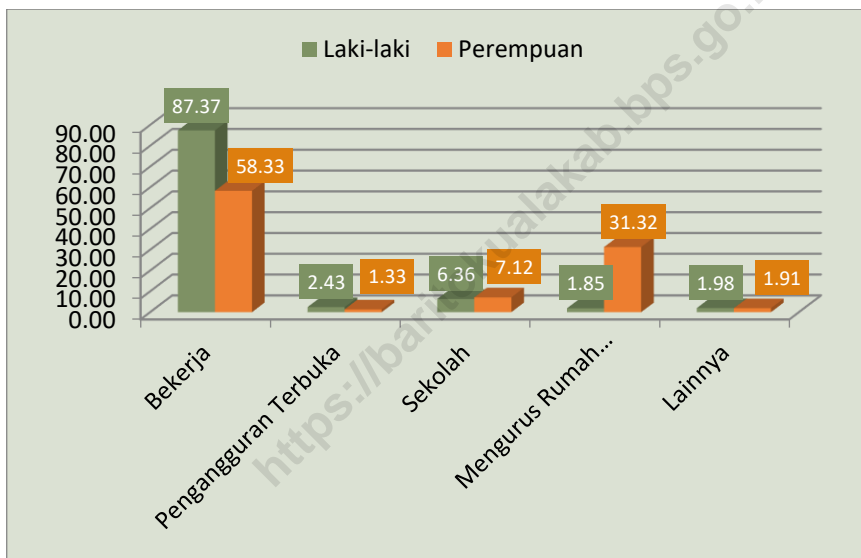
Secara umum, problematika ketenagakerjaan di Kabupaten Barito Kuala tidak jauh berbeda dengan permasalahan ketenagakerjaan di wilayah lain di Indonesia. Permasalahan itu berkaitan dengan tingkat pengangguran, jumlah jam kerja, dan ketidakmerataan penyerapan tenaga kerja pada berbagai sektor lapangan usaha. Akibatnya, beberapa sektor ketenagakerjaan yang potensial tidak berkembang secara optimal. Untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan tersebut maka perlu disusun kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang terpola dan terpadu. Hal ini menuntut tersedianya data dan informasi yang menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di Barito Kuala. Indikator yang perlu diperhatikan dalam perencanaan tenaga kerja antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Daya Serap Tenaga Kerja, Produktivitas Pekerja, maupun tingkat pengangguran. Indikator-indikator tersebut dihasilkan dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh BPS setiap tahun. Pada tahun 2019, BPS tidak bisa melaksanakan kegiatan Sakernas Tahunan karena ada penghematan APBN. Dampaknya adalah data ketenagakerjaan tahun 2019 sampai level kabupaten/kota tidak bisa disajikan. Oleh karena itu, dalam publikasi ini akan menyajikan data ketenagakerjaan tahun 2019.

5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Pembangunan banyak dipengaruhi oleh hubungan antara manusia dengan faktor-faktor produksi yang lain, ketersediaan pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi dapat dilihat dari besarnya keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi. Suatu indikator yang biasa digunakan untuk mengukur hal tersebut adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Indikator ini menggambarkan besarnya keterlibatan penduduk secara aktif dalam kegiatan ekonomi.

Penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas) dibedakan menjadi penduduk angkatan kerja dan penduduk bukan angkatan kerja.

Pengelompokan ini berdasarkan pada jenis kegiatan utama yang dilakukan selama seminggu yang lalu. Angkatan kerja adalah penduduk yang aktif secara ekonomi atau ingin terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi. Penduduk yang masuk dalam kelompok ini adalah penduduk yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk bukan angkatan kerja adalah penduduk yang tidak terlibat dalam pasar kerja, yaitu penduduk dengan kegiatan utamanya sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya (seperti: pensiunan, penerima pendapatan/transfer, jompo atau alasan lain).



Sumber : Olah data Sakernas, BPS Barito Kuala 2019

Gambar 5.1 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama Selama Seminggu yang lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Kuala, 2019

Pada tahun 2019, proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang berstatus bekerja secara keseluruhan sebesar 72,87 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas terdapat sebanyak 72 s.d. 73 penduduk yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi atau masuk dalam dunia kerja. Berdasarkan Gambar 5.1., jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, proporsi penduduk laki-laki yang bekerja lebih

besar dibandingkan penduduk perempuan. Proporsi penduduk laki-laki usia 15 tahun keatas yang kegiatan utamanya bekerja mencapai 87,37 persen, sedangkan penduduk perempuan hanya 58,33 persen. Persentase terbesar kedua kegiatan utama penduduk perempuan setelah bekerja adalah mengurus rumah tangga (31,32 persen). Pada kegiatan ini proporsi penduduk laki-laki jauh lebih sedikit, yaitu hanya sekitar 1,85 persen. Hal ini dikarenakan karena peran laki-laki sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, sedangkan perempuan hanya membantu saja dan lebih banyak waktu di rumah untuk mengurus rumah tangga.

Penduduk yang termasuk Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran terbuka. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (berusia 15 tahun keatas) selama periode tertentu. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2019 sebesar 74,75 persen. Dari total angkatan kerja tersebut, 97,49 persen berstatus bekerja. Hal ini berarti bahwa terdapat sebanyak 165.277 jiwa penduduk berusia 15 tahun keatas yang berstatus bekerja, sedangkan penduduk tidak bekerja ataupun pengangguran adalah sebesar 2,51 persen atau sekitar 4.263 penduduk di tahun 2019. Angka pengangguran tersebut menurun jika dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 3,99 persen.

Sementara itu, penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang masih bersekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya. Berdasarkan tabel 5.1., diantara penduduk bukan angkatan kerja, persentase penduduk perempuan (40,34 persen) lebih tinggi daripada laki laki (10,20 persen). Hal ini dikarenakan penduduk yang mengurus rumah tangga memiliki persentase tertinggi yaitu sebesar 65,61 persen, yang sebagian besar dari mereka adalah penduduk perempuan.

Tabel 5.1 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019

Uraian	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK (%)	89,80	59,66	74,75
- Bekerja	97,27	97,77	97,49
- Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%)	2,71	2,23	2,51
Bukan Angkatan Kerja (%)	10,20	40,34	25,25

Sumber : Olah data Sakernas, BPS Barito Kuala 2019

Partisipasi angkatan kerja perlu dipilah berdasarkan jenis kelamin. Hal ini untuk melihat keterlibatan perempuan dalam hal ekonomi. Berdasarkan hasil Sakernas 2019, persentase penduduk perempuan usia 15 tahun keatas di Kabupaten Barito Kuala yang aktif di pasar tenaga kerja lebih rendah dibandingkan penduduk laki-laki. TPAK laki-laki sebesar 89,80 persen sedangkan TPAK perempuan mencapai 59,66 persen saja. Dengan kata lain, dari 100 penduduk perempuan usia 15 tahun keatas terdapat 40 s.d. 41 orang yang tidak aktif secara ekonomi. Secara tidak langsung, kondisi ini juga menggambarkan bahwa proporsi jumlah penduduk yang berstatus bukan angkatan kerja lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki.

5.2 Daya Serap Tenaga Kerja

Indikator persentase penduduk yang bekerja di setiap lapangan usaha biasa dipakai sebagai salah satu indikator potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja.

Tabel 5.2 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Sektor Lapangan Usaha Pekerjaan utama Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kabupaten Barito Kuala, Agustus 2019

Sektor Lapangan Usaha	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	51,60	47,94	50,14
Pertambangan, Penggalian, Industri, dan Konstruksi	17,88	12,55	15,75
Jasa	30,52	39,51	34,11
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan, 2019

Seperti yang terlihat pada Tabel 5.2., sektor lapangan usaha di Kabupaten Barito Kuala yang mampu menyerap tenaga kerja terbanyak adalah sektor pertanian sebesar 50,14 persen. Hal ini menunjukkan bahwa separuh penduduk yang bekerja berada di sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan. Sebagai salah satu daerah yang menjadi lumbung padi Provinsi Kalimantan Selatan hal ini tentunya wajar terjadi. Namun terdapat kelemahan dari sektor pertanian bahwa antara jumlah tenaga kerja yang mampu diserap pada sektor pertanian tersebut, ternyata nilai tambah yang dihasilkannya tidak seimbang, sehingga tingkat produktivitasnya cenderung rendah.

Sektor kedua yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar adalah sektor perdagangan, rumah makan, jasa, dan lain-lain sebesar

39,51 persen. Sektor lapangan usaha di Kabupaten Barito Kuala yang penyerapan tenaga kerjanya paling kecil adalah sektor Pertambangan dan Penggalian, Industri, Konstruksi, serta Listrik Air dan Gas yaitu sebesar 15,75 persen.

Jika dipilah berdasarkan jenis kelamin, sektor lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja laki-laki dan perempuan terbanyak adalah sektor pertanian yaitu masing-masing sebesar 51,60 persen dan 47,94 persen. Jika dilakukan perbandingan, pada sektor pertambangan, konstruksi, dan industri penyerapan tenaga kerja laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan tenaga kerja perempuan. Pada sektor tersebut penyerapan tenaga kerja laki-laki sebesar 17,88 persen sedangkan perempuan hanya 12,55 persen. Hal ini terjadi karena jenis pekerjaan di lapangan usaha tersebut cenderung lebih berat seperti buruh angkut pada penggalian pasir, buruh pabrik industri penggilingan padi, dan sejenisnya yang memerlukan tenaga laki-laki dibandingkan perempuan. Kondisi sebaliknya terjadi pada sektor Jasa. Pada sektor ini, penyerapan tenaga kerja perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Proporsi tenaga kerja perempuan yang bekerja di sektor Jasa mencapai 39,51 persen sedangkan laki-laki 30,52 persen.

Secara sederhana kegiatan formal dan informal dari penduduk yang bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Sektor formal adalah penduduk yang bekerja dengan status berusaha dibantu dengan buruh tetap/buruh dibayar serta penduduk yang bekerja dengan status bekerja sebagai buruh, karyawan dan pegawai. Sedangkan sektor informal adalah penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu dengan buruh atau karyawan tidak dibayar, pekerja keluarga, pekerja bebas dan lainnya. Kondisi penduduk Kabupaten Barito Kuala tahun 2019 yang berusia 15 tahun keatas berdasarkan status pekerjaan utama dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 5.3. berikut.

Tabel 5.3 Persentase penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kabupaten Barito Kuala, 2019

Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha Sendiri	14,92	14,85	14,90
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	30,87	12,52	23,53
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	3,57	1,34	2,68
Buruh/Karyawan/Pegawai	30,78	20,52	26,67
Pekerja Bebas	9,04	7,77	8,53
Pekerja Keluarga/Pekerja Tidak Dibayar	10,82	43,00	23,69
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : Olah data Sakernas, BPS Barito Kuala 2019

Berdasarkan tabel 5.3., pada tahun 2019, di Kabupaten Barito Kuala ada sekitar 29,35 persen penduduk bekerja di sektor formal (status berusaha dibantu buruh tetap/dibayar dan status buruh/karyawan/pegawai) dan selebihnya sebesar 70,65 persen bekerja di sektor informal. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, proporsi pekerja sektor formal lebih besar untuk penduduk laki-laki dibandingkan dengan penduduk perempuan. Penduduk laki-laki yang bekerja di sektor formal mencapai 34,35 persen sedangkan perempuan hanya 21,68 persen. Sementara itu, penduduk perempuan mendominasi di sektor informal yaitu sebesar 78,32 persen.

Pekerja laki-laki di sektor formal didominasi oleh mereka yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai yang persentasenya sebesar 30,78 persen, sementara persentase pekerja yang dibantu buruh tetap/buruh dibayar hanya sebagian kecil, yaitu sebesar 3,57 persen. Sementara itu, di sektor informal, pekerja perempuan didominasi oleh pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar dengan persentase sebesar 43,00 persen, diikuti oleh pekerja berusaha sendiri 14,85 persen; pekerja berusaha pekerja tidak tetap/tidak dibayar dengan persentase sebesar 12,52 persen; dan pekerja bebas sebesar 7,77 persen.

Lebih lanjut, berdasarkan tabel 5.3., jika dirinci berdasarkan status pekerjaannya, terdapat sebanyak 26,67 persen pekerja di Kabupaten Barito Kuala yang berstatus karyawan/buruh/pegawai dan 23,53 persen berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar. Proporsi penduduk laki-laki yang status pekerjaannya berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Selain itu, terdapat sebanyak 23,69 persen pekerja di Barito Kuala berstatus pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar. Artinya hampir seperempat pekerja adalah mereka yang bekerja tetapi hanya membantu untuk mendapatkan penghasilan. Mereka memiliki aktivitas bekerja namun tidak mendapatkan balas jasa atau memperoleh pendapatan secara langsung atas pekerjaan yang dilakukan yang bisa digunakan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. Persentase pekerja keluarga/tidak dibayar ini lebih besar untuk penduduk perempuan dibandingkan laki-laki. Hal ini dikarenakan biasanya dalam suatu keluarga, para istri membantu usaha suaminya.

5.3 Produktivitas Pekerja

Indikator yang digunakan untuk melihat produktivitas dan optimalisasi para pekerja dalam lapangan usaha yang dilakukan adalah indikator jumlah jam kerja keseluruhan. Terkait dengan jumlah jam kerja yang dihabiskan selama seminggu, seorang pekerja dapat dikategorikan sebagai pekerja tidak penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jam

kerja rata-rata selama seminggu (kurang dari 35 jam), yang terdiri dari setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu. Biasanya pekerja semacam ini memiliki pendapatan di bawah kemampuan sebenarnya. Selain itu seseorang yang terpaksa bekerja di bawah 35 jam merupakan orang-orang yang mempunyai kemampuan tetapi tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, keahlian atau keterampilannya.

Tabel 5.4 Persentase Pengangguran, Setengah Pengangguran, Pekerja Paruh Waktu dan Pekerja Penuh Waktu Kabupaten Barito Kuala, Agustus 2019

Angkatan Kerja	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Pengangguran	2,71	2,23	2,51
Setengah Pengangguran	8,13	7,01	7,69
Pekerja Paruh Waktu	17,76	34,99	24,63
Pekerja Penuh Waktu	71,4	55,77	65,17
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : Olah data Sakernas, BPS Barito Kuala 2019

Berdasarkan Tabel 5.4., di Kabupaten Barito Kuala persentase pekerja dengan jam kerja di bawah jam kerja normal (dibawah 35 jam) selama satu minggu yang lalu, yaitu sebesar 25,89 persen. Proporsi pekerja dengan jam kerja di bawah jam kerja normal (dibawah 35 jam) selama satu minggu yang lalu lebih banyak penduduk berjenis kelamin perempuan dibandingkan laki-laki. Banyaknya penduduk dengan jam kerja kurang dari 35 jam ini disebabkan sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian yang tidak menuntut jam kerja yang tinggi

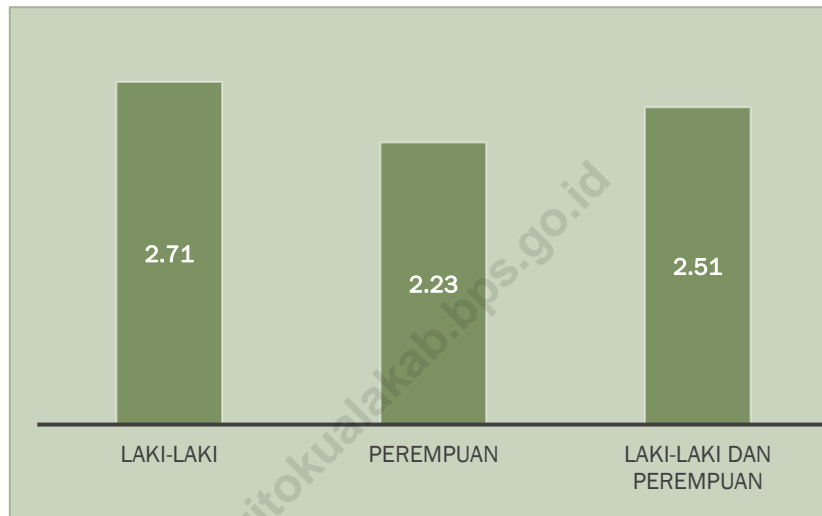
kecuali pada saat tertentu saja seperti musim tanam atau musim panen. Untuk penduduk laki-laki didominasi oleh pekerja penuh waktu yaitu mereka yang bekerja dengan jam kerja 35 jam atau lebih per minggu, dengan proporsi sebesar 71,40 persen. Biasanya jenis pekerjaan yang menuntut jam kerja yang tinggi seperti buruh/karyawan di pabrik atau perusahaan, sopir, penjaga keamanan, dll yang memang didominasi oleh pekerja laki-laki. Sejalan dengan penduduk laki-laki, kondisi angkatan kerja penduduk perempuan juga didominasi oleh pekerja penuh waktu, namun dengan proporsi yang lebih kecil yaitu sebesar 55,77 persen. Dengan proporsi total penduduk laki-laki dan perempuan yang didominasi oleh pekerja penuh waktu yaitu sebesar 65,17 persen, dapat dikatakan bahwa angkatan kerja di Barito Kuala cukup produktif jika dilihat dari sisi total jam kerja per minggu.

5.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Salah satu isu penting dalam bidang ketenagakerjaan adalah masalah pengangguran. Isu ini menjadi fokus perhatian selain kondisi perkembangan angkatan kerja (*economically active population*) dan struktur ketenagakerjaan. Ditinjau dari sisi ekonomi, pengangguran merupakan hasil dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia, Jumlah lapangan kerja yang tersedia memiliki keterbatasan secara jumlah dan kualifikasi bagi pencari kerja.

Pengangguran merupakan akibat dari peningkatan jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan peningkatan jumlah lapangan kerja. Lapangan kerja semakin sempit sehingga banyak angkatan kerja yang tidak terserap dalam lapangan kerja, Dalam bahasan ini yang termasuk penganggur adalah mereka yang tergolong dalam usia kerja yang pada saat pencacahan tidak bekerja, tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, tidak bekerja dan sedang mempersiapkan usaha, tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (*discouraged workers*), serta tidak bekerja dan

tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja (*future starts*). Indikator yang digunakan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Indikator ini merupakan perbandingan jumlah pengangguran yang dimaksud terhadap jumlah penduduk angkatan kerja.

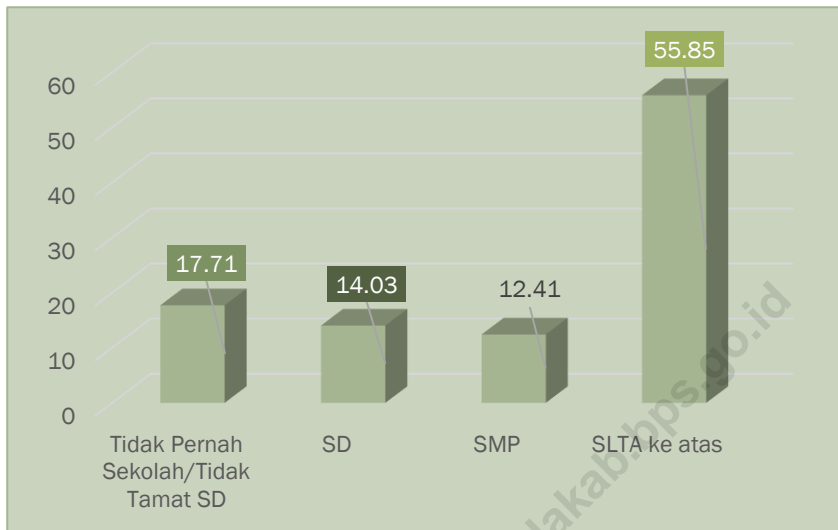


Sumber : Olah data Sakernas, BPS Barito Kuala 2019

Gambar 5.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Kuala, 2019

Berdasarkan Gambar 5.2. diatas, pada tahun 2019 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Barito Kuala secara umum adalah 2,51 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk angkatan kerja, 2 s.d. 3 orang diantaranya adalah pengangguran. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 2,99, angka TPT secara umum dapat dikatakan sedikit menurun. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah lapangan pekerjaan di tahun 2019. Lebih lanjut, jika dilihat berdasarkan karakteristiknya, pada penduduk laki-laki tingkat pengangguran lebih tinggi yaitu sebesar 2,71 persen, sedangkan penduduk perempuan sebesar 2,23 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa dari 100 penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas, terdapat 2

s.d. 3 orang diantaranya yang tidak bekerja/menganggur, begitu juga untuk penduduk laki-laki.



Sumber : Olah data Sakernas, BPS Barito Kuala 2019

Gambar 5.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Barito Kuala, 2019

Selain dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin, tingkat pengangguran juga dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan. Berdasarkan Gambar 5.3. diatas, terlihat bahwa persentase pengangguran tertinggi pada mereka yang menamatkan pendidikan SMA ke atas yaitu sebesar 55,85 persen. Dengan kata lain, sekitar setengah dari pengangguran terbuka adalah yang menamatkan pendidikan minimal sampai jenjang SMA. Selanjutnya diikuti oleh mereka yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD dengan persentase sebesar 17,71 persen, diikuti dengan pendidikan yang ditamatkan SD dan SMP dengan proporsi masing-masing sebesar 14,03 dan 12,41 persen. Kondisi tersebut dapat terjadi terkait dengan sektor pertanian yang paling banyak menyerap tenaga kerja paling banyak adalah sektor dengan angkatan kerja yang didominasi oleh mereka yang

berpendidikan SMP ke bawah. Sementara itu, mereka yang menamatkan pendidikan SMA ke atas cenderung menginginkan pekerjaan yang stabil di sektor formal yang biasanya adalah mereka yang masih mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha.

<https://baritokualakab.bps.go.id>



BAB VI

PERUMAHAN

<https://bainings-go.id>



BAB VI

PERUMAHAN

Kebutuhan akan perumahan (papan) merupakan kebutuhan primer bagi setiap orang disamping kebutuhan pangan dan sandang, Arti fisik perumahan/pemukiman adalah tempat tinggal individu/anggota masyarakat yang biasanya hidup dalam ikatan perkawinan atau keluarga dengan berbagai fasilitas pendukungnya. Dalam pengertian yang luas, rumah bukan hanya sebuah bangunan (struktural), melainkan juga tempat tinggal atau hunian yang memenuhi syarat-syarat kehidupan yang layak, dipandang dari berbagai segi kehidupan masyarakat, Oleh karena itu, rumah seharusnya mampu memberikan rasa nyaman bagi penghuninya sekaligus harus memenuhi syarat-syarat kesehatan.

Selain berfungsi sebagai tempat tinggal, rumah juga berfungsi sebagai tempat pembinaan keluarga. Di dalam rumah, penghuni memperoleh kesan pertama dari kehidupannya di dalam dunia ini, Rumah harus menjamin kepentingan keluarga, yaitu untuk tumbuh dan berkembang, memberi kemungkinan untuk hidup bergaul dengan tetangganya, dan lebih dari itu, rumah harus memberi ketenangan, kesenangan, kebahagiaan, dan kenyamanan pada segala peristiwa hidupnya. Dalam fungsinya sebagai tempat tinggal, selayaknya sebuah rumah memiliki bentuk fisik dan fasilitas yang memadai. Dengan demikian, fungsi rumah sebagai sarana pembinaan keluarga dapat memperoleh hasil yang maksimal yaitu tercapainya peningkatan kualitas SDM.

Rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberi ketentraman hidup bagi manusia. Dalam fungsinya sebagai pengamanan diri bukan berarti menutup diri tetapi harus membuka diri menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal

mempengaruhi terhadap status kesehatan penghuninya. Kualitas rumah tinggal yang baik dalam lingkungan sehat, aman, lestari dan berkelanjutan (Kepmen No. 9 Tahun 1999) diartikan sebagai suatu kondisi rumah yang memenuhi standard minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan kualitas teknis. Menurut Krieger dan Higgins (2002), selain merupakan kebutuhan dasar manusia, rumah juga merupakan determinan kesehatan masyarakat. Karena itu, rumah yang layak untuk tempat tinggal harus memenuhi syarat kesehatan sehingga penghuninya tetap sehat. Rumah yang sehat tidak lepas dari ketersediaan fasilitas terkait seperti penyediaan air bersih, sanitasi layak, dan tersedianya pelayanan sosial.

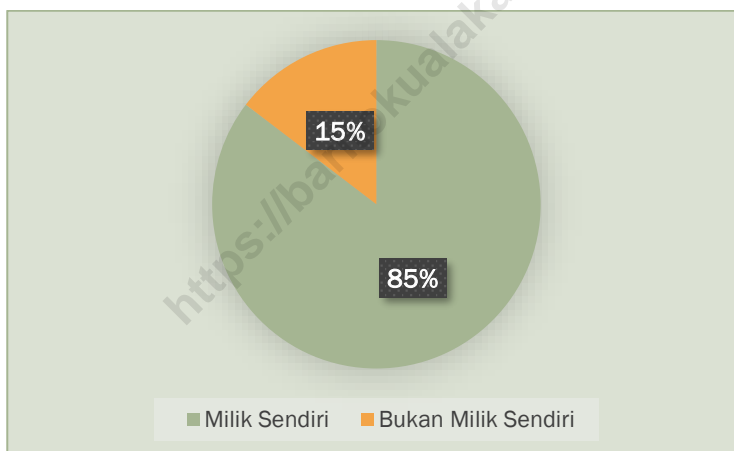
Undang-Undang No, 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 4 tahun 1992 mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah, Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

Penilaian terhadap kondisi permukiman yang mencerminkan tingkat kesejahteraan rumah tangga dapat dilihat melalui beberapa indikator diantaranya: status penguasaan rumah tempat tinggal; kualitas material perumahan seperti atap, dinding dan lantai terluas; fasilitas penunjang yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan

yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

6.1 Penguasaan Tempat Tinggal

Status penguasaan tempat tinggal merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjangkau dan permanen dalam jangka panjang. Semakin banyak persentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri maka semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. Persentase rumah milik sendiri ini menggambarkan tingkat kemampuan masyarakat dalam memenuhi salah satu kebutuhan pokok hidupnya, yaitu papan (tempat tinggal).



Sumber: Olah Susenas 2019, BPS Kabupaten Barito Kuala

Gambar 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Tempat Tinggal di Kabupaten Barito Kuala, 2019

Berdasarkan hasil Susenas 2019 Kabupaten Barito Kuala pada Gambar 6.1, secara umum sebagian besar rumah tangga sudah tinggal di rumah milik sendiri yaitu sebesar 85,64 persen. Selain rumah milik sendiri, terdapat sebanyak 14,36 persen rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah selain milik sendiri (termasuk didalamnya yang

kontrak/sewa, bebas sewa, rumah dinas/lainnya). Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin Kepala Rumah Tangga (KRT), persentase rumah tangga yang tinggal di rumah milik sendiri lebih banyak KRT perempuan (88,98 persen) dibandingkan KRT laki-laki (85,09 persen). Sementara itu, pada rumah tangga yang tinggal di bangunan yang bukan milik sendiri, persentase rumah tangga dengan KRT laki-laki (14,91 persen) lebih besar daripada KRT perempuan (11,02 persen).

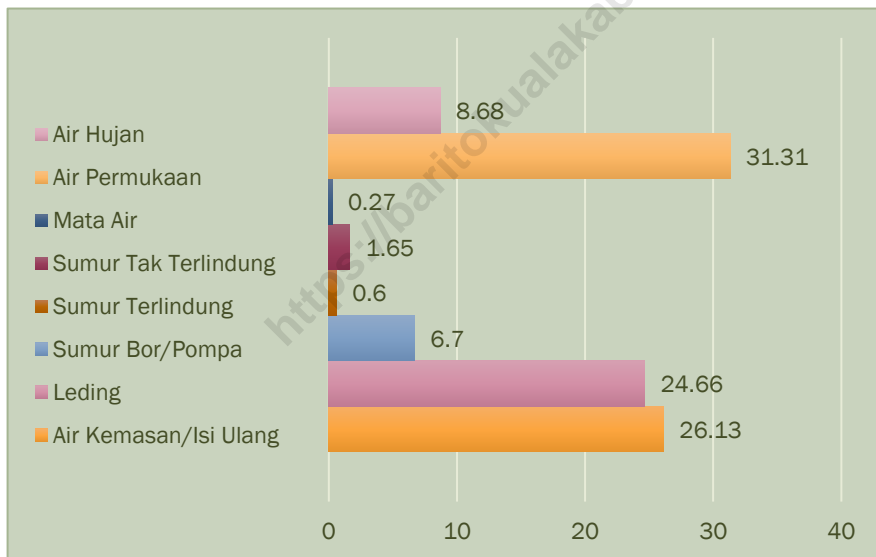
Besarnya angka kepemilikan rumah sendiri secara umum mengindikasikan bahwa pembangunan perumahan secara umum berjalan dengan dinamis seiring dengan penambahan penduduk dan peningkatan tingkat kesejahteraan, khususnya di daerah yang berdekatan dengan Ibukota Provinsi dan yang berada di Ibukota Kabupaten. Perkembangan sektor perumahan yang dinamis hendaknya turut pula diimbangi dengan keselarasan dampaknya terhadap lingkungan, agar pembangunan rumah dan bangunan tetap ramah terhadap lingkungan.

6.2 Fasilitas Tempat Tinggal

Tingkat kesejahteraan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh kualitas bangunannya akan tetapi juga ditentukan oleh fasilitas yang digunakan oleh rumah tangga tersebut, seperti penyediaan air bersih, sanitasi, penerangan, bahan bakar memasak maupun pelayanan sosial. Penyediaan berbagai macam fasilitas penunjang rumah tangga sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi rumah tangga tersebut. Rumah tangga yang dapat menyediakan fasilitas penunjang tempat tinggal yang memadai tentu memiliki tingkat kesejahteraan yang cukup bagus. Selain itu, kelengkapan fasilitas tempat tinggal suatu rumah akan menentukan kenyamanan tempat tinggal yang akan berdampak pada kualitas rumah itu sendiri.

Sumber Air Minum

Air adalah unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Bahkan dapat dipastikan tanpa pengembangan sumber daya air secara konsisten peradaban manusia tidak akan mencapai tingkat yang dinikmati sampai saat ini. Oleh karena itu, pengembangan dan pengolahan sumber daya air merupakan dasar peradaban manusia, Dari Pengertian dan Definisi Air maka dapat di ambil kesimpulan bahwa salah satu faktor penting penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk kebutuhan air minum. Air bersih merupakan air yang harus bebas dari mikroorganisme penyebab penyakit dan bahan-bahan kimia yang dapat merugikan kesehatan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Air merupakan zat kehidupan, di mana tidak ada satu pun makhluk hidup di bumi ini yang tidak membutuhkan air.



Sumber: Olah Susenas 2019, BPS Kabupaten Barito Kuala

Gambar 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019

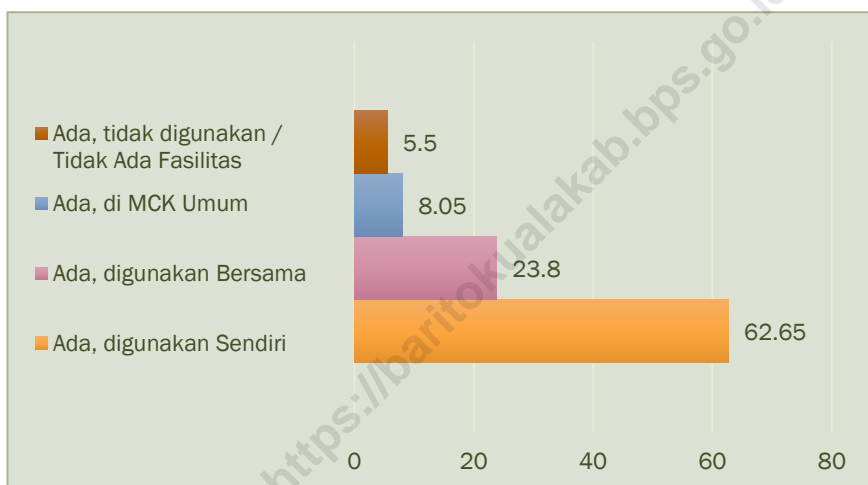
Salah satu kelengkapan fasilitas rumah tangga adalah tersedianya fasilitas air minum yang memadai. Sumber air minum yang berasal dari air kemasan, air isi ulang, ledeng dan sumur bor/pompa,

sumur terlindung serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat kurang dari 10 meter dikategorikan sebagai sumber air minum bersih. Selanjutnya, sumber air minum yang berasal dari ledeng, air hujan, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat lebih dari 10 meter dikategorikan dalam sumber air minum layak. Selain itu terdapat juga sumber air minum utama yang berasal dari air hujan dan air permukaan seperti dari sungai, danau, dan sejenisnya.

Gambar 6.1. menyajikan grafik persentase penggunaan air minum utama rumah tangga di Barito Kuala tahun 2019. Dari grafik tersebut terlihat bahwa persentase terbesar penggunaan air minum rumah tangga di Barito Kuala tahun 2019 adalah air permukaan, yaitu sebesar 31,31 persen. Artinya, hampir sepertiga dari rumah tangga di Barito Kuala tahun 2019 masih belum terpenuhi sumber air minum bersih ataupun sumber air minum layak. Masih besarnya persentase rumah tangga yang belum mengakses air bersih maupun air layak di Kabupaten Barito Kuala dikarenakan sebagian masyarakat masih menggunakan air sungai sebagai sumber minum yang sebenarnya tidak masuk dalam kategori air minum bersih maupun air minum layak. Hal ini patut jadi perhatian pemerintah daerah untuk menyediakan program penyediaan air bersih khususnya di daerah perdesaan sehingga dapat mewujudkan program Millenium Development Goals (MDGs) tujuan 7 yaitu Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup. Perkembangan pembangunan dunia yang berarah kepada pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) dimana salah satu tujuannya adalah mencapai akses air minum universal dan layak yang aman dan terjangkau bagi semua pada tahun 2030. Fokusnya tidak hanya penggunaan air bersih saja tetapi air minum layak.

Fasilitas Tempat Buang Air Besar

Salah satu indikator perumahan yang berhubungan dengan sanitasi adalah keberadaan tempat buang air besar (BAB). Indikator ini juga terkait dengan kesadaran masyarakat pada kesehatan. Fasilitas buang air besar (jamban) merupakan salah satu sarana pokok untuk mewujudkan kehidupan yang sehat. Tersedianya fasilitas yang memadai akan berpengaruh terhadap lingkungan dan kesehatan pribadi manusia. Oleh karena itu, peningkatan jenis fasilitas buang air besar dan peningkatan wawasan masyarakat tentang pentingnya sarana ini harus terus disampaikan secara persuasif dan intensif.



Sumber: Olah Susenas 2019, BPS Kabupaten Barito Kuala

Gambar 6.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Barito Kuala, 2019

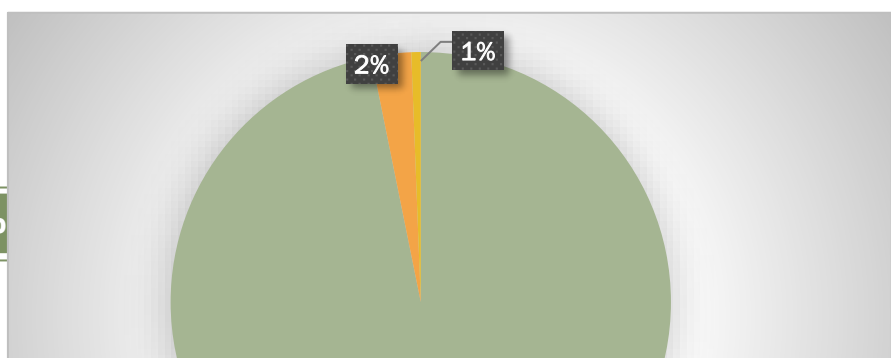
Jamban yaitu suatu pembuangan yang digunakan oleh keluarga atau sejumlah keluarga untuk buang air besar. Cara pembuangan tinja, prinsipnya yaitu: kotoran manusia tidak mencemari permukaan tanah, kotoran manusia tidak mencemari air permukaan/air tanah, kotoran manusia tidak dijamah lalat, jamban tidak menimbulkan bau yang mengganggu, konstruksi jamban tidak menimbulkan kecelakaan, dan Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL).

Berdasarkan Gambar 6.3, pada tahun 2019 di Kabupaten Barito Kuala terdapat 62,65 persen rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri, sementara rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat buang air yang digunakan bersama sebesar 23,8 persen. Sebagian dari rumah tangga juga masih ada yang menggunakan MCK umum yaitu sebesar 8,09 persen, sementara sisanya sekitar 5,5 persen rumah tangga memiliki fasilitas buang air namun tidak menggunakannya dan rumah tangga yang sama sekali tidak memiliki fasilitas tersebut. Jika dibandingkan tahun 2018 yang nilainya sebesar 59,35 persen, persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas sendiri dapat dikatakan meningkat. Meskipun demikian, masih terdapat rumah tangga yang belum memiliki fasilitas buang air besar sehingga diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mengupayakan untuk membangun fasilitas buang air besar.

Penerangan

Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditempati adalah tersedianya fasilitas penerangan yang memadai. Fasilitas penerangan rumah terdiri dari rumah tangga yang menggunakan listrik (PLN dan non PLN) dan yang menggunakan penerangan selain listrik seperti lampu minyak, obor, dan lain-lain termasuk yang tidak menggunakan penerangan.

Pemakaian penerangan berupa listrik dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Penduduk yang dapat mengakses listrik dapat diasumsikan telah mempunyai kemampuan ekonomi yang relatif lebih baik dan mempunyai peluang yang lebih besar untuk mengembangkan kehidupan sosial dan ekonominya.



Sumber: Olah Susenas 2019, BPS Kabupaten Barito Kuala

Gambar 6.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Penerangan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019

Berdasarkan Gambar 6.4, ditinjau dari sumber penerangan utama yang menggunakan listrik, mayoritas rumah tangga (96,82 persen) di Barito telah menggunakan listrik yang bersumber dari PLN. Sementara itu 2,57 persen rumah tangga menggunakan listrik yang bukan bersumber dari PLN seperti genset pribadi atau sejenisnya. Akan tetapi, masih terdapat 0,61 persen rumah tangga yang masih belum menggunakan listrik seperti menggunakan lampu minyak atau sejenisnya. Kondisi ini dapat terjadi karena wilayah tempat tinggal yang belum terjangkau oleh listrik PLN atau memang rumah tangga tersebut tidak mampu secara ekonomi untuk membayar biaya pemasangannya.



BAB VII

POLA KONSUMSI DAN KEMISKINAN



BAB VII

POLA KONSUMSI DAN KEMISKINAN

7.1 Pola Konsumsi

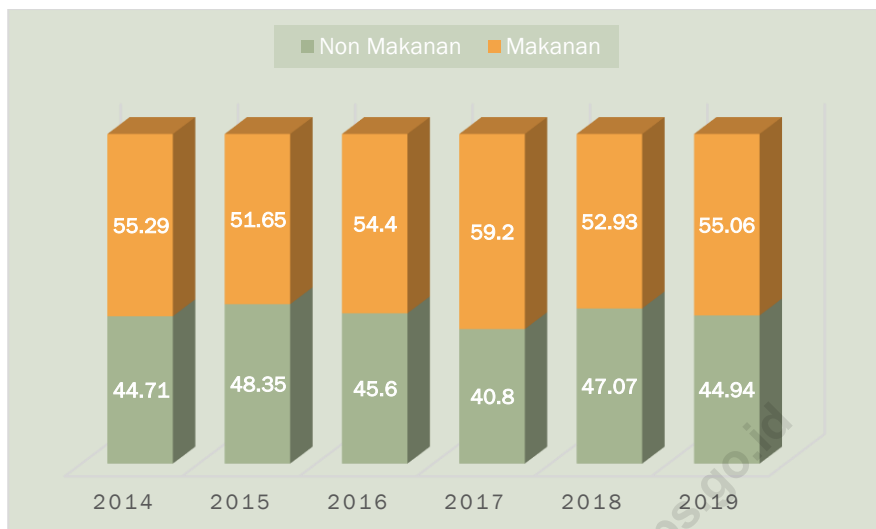
Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat digambarkan dengan pendapatan/penghasilannya. Pada kenyataannya sangat sulit untuk mendapatkan data pendapatan/penghasilan penduduk melalui sebuah survei. Hambatan teknis pada saat wawancara ialah adanya kecenderungan masyarakat memberikan jawaban yang kurang relevan. Sebaliknya apabila ditanyakan tentang pengeluaran konsumsi, penduduk/masyarakat memberikan jawaban dengan jujur dan relevan. Oleh karena itu, digunakan pendekatan melalui besarnya pengeluaran dalam suatu rumah tangga dalam suatu jangka waktu tertentu, baik untuk kebutuhan makanan maupun non makanan. Besarnya nilai nominal (rupiah) yang dibelanjakan baik dalam bentuk makanan maupun non makanan, secara tidak langsung dapat mencerminkan kemampuan ekonomi rumah tangga, untuk mencukupi kebutuhan yang mencakup barang dan jasa.

Secara umum konsumsi/pengeluaran rumah tangga terbagi ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu konsumsi/pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Dengan kedua jenis pengeluaran tersebut, dapat dilihat bagaimana pola konsumsi masyarakat. Tingkat kebutuhan/permintaan (*demand*) terhadap kedua kelompok pengeluaran tersebut pada dasarnya berbeda. Dalam kondisi pendapatan terbatas akan mendahulukan pemenuhan makanan, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan. Seiring dengan peningkatan pendapatan maka lambat laun akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan porsi

pendapatan yang dibelanjakan untuk bukan makanan. Pergeseran komposisi atau pola pengeluaran tersebut terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sementara elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini semakin jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan (kalau bukan disimpan/ditabung atau diinvestasikan kembali).

Dari uraian tersebut dapat diartikan bahwa pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan (ekonomi) penduduk, dan perubahan komposisinya sebagai indikasi perubahan tingkat kesejahteraan. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia pengeluaran untuk makanan masih merupakan bagian terbesar dari pengeluaran rumah tangga. Sebaliknya di negara-negara maju, pengeluaran untuk aneka barang dan jasa, merupakan bagian terbesar dari pengeluaran rumahtangga. Pengeluaran tersebut tidak bersifat primer lagi, antara lain pengeluaran untuk perawatan kesehatan, perawatan kecantikan, peningkatan pendidikan, rekreasi, olah raga dan sebagainya.

Rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita selama sebulan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012-2018, rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita selama sebulan hanya Rp.571.202,- saja. Kemudian meningkat pada tahun-tahun berikutnya yaitu sebesar Rp.665.817,- (2013), Rp.748.851,- (2014), Rp.825.799,- (2017), dan Rp.1.029.615 (2018). Peningkatan rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan penduduk Barito Kuala pada periode tersebut. Akan tetapi pada tahun 2019 pengeluaran per kapita di Barito Kuala terjadi sedikit penurunan yaitu menjadi Rp. 944.672 per bulan. Lebih lanjut, pengeluaran per kapita dapat dilihat juga berdasarkan kelompok pengeluaran makanan dan bukan makanan.



Sumber: Olah Susenas 2019, Kabupaten Barito Kuala

Gambar 7.1 Persentase Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2014 s.d. 2019

Seperti yang terlihat pada gambar 7.1. pada tahun 2019 proporsi non makanan (44,94 persen) menurun dari tahun sebelumnya di tahun 2017 yang sebesar 47,07 persen. Sebaliknya, untuk proporsi makanan di Barito Kuala meningkat dari sebelumnya sebesar 52,93 pada tahun 2018 menjadi 55,08 persen di tahun 2019. Jika dilihat tren kedua kelompok tersebut dari tahun 2014-2019, pengeluaran per kapita per kelompok di Barito Kuala cukup fluktuatif meskipun secara umum memiliki tren yang positif. Selain dikelompokkan menjadi makanan dan non makanan, pengeluaran per kapita juga dapat dirinci menurut kelompok pengeluaran yang terbagi menjadi 6 kelompok. Tabel berikut menyajikan persentase rumah tangga menurut kelompok pengeluaran di Barito Kuala pada dua tahun terakhir.

Tabel 7.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Kelompok Pengeluaran Sebulan Per Kapita di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019

Kelompok Pengeluaran (rupiah)	Persentase Penduduk
(1)	(2)
< 299.999	0,12
300.000 – 499.999	15,33
500.000 – 749.999	29,83
750.000 – 999.999	21,81
1.000.000 – 1.499.999	21,57
1.500.000+	11,35
Jumlah/ Total	100,00

Sumber: Olah Susenas 2019, Kabupaten Barito Kuala

Berdasarkan data Susenas 2019 pada tabel 7.1., di Kabupaten Barito Kuala mayoritas rumah tangga berada pada kelompok pengeluaran sebulan perkapita Rp500.000,- s.d. Rp749.999,- yaitu sebesar 29,83 persen rumah tangga. Sementara itu, rumah tangga yang berada pada kelompok pengeluaran terbawah (kurang dari Rp299.999,-) sebesar 0,12 persen, sedangkan pada kelompok pengeluaran sebulan perkapita tertinggi (lebih dari atau sama dengan Rp1.500.000,-) sebesar 11,35 persen rumah tangga. Untuk kedua kategori tersebut, baik kelompok pengeluaran per kapita tertinggi maupun terendah menurun dari tahun 2018. Pada tahun sebelumnya, kelompok tertinggi mencapai 16,10 pesen sedangkan kelompok terendah sebesar 1,90 persen. Kondisi ini sekilas menggambarkan berkurangnya ketimpangan pendapatan per kapita antar penduduk di Kabupaten Barito Kuala.

Tabel 7.2 Pengeluaran Makanan Per kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 s.d. 2019

JENIS PENGELUARAN	Rata-rata Pengeluaran (Rp)		Persentase (%)	
	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
MAKANAN	544 931	520 166	52,93	55,06
A. Padi-padian	72 676	69 540	7,06	7,36
B. Umbi-umbian	3 124	2 951	0,31	0,31
C. Ikan/udang/cumi	60 470	58 254	5,87	6,17
D. Daging	12 667	14 966	1,23	1,58
E. Telur & Susu	29 618	29 339	2,88	3,11
F. Sayur-sayuran	30 096	30 478	2,92	3,23
G. Kacang-kacangan	7 145	7 707	0,69	0,82
H. Buah-buahan	21 062	20 826	2,05	2,20
I. Minyak dan lemak	13 307	13 320	1,29	1,41
J. Bahan minuman	20 536	20 016	1,99	2,12
K. Bumbu-bumbuan	12 973	12 798	1,26	1,35
L. Konsumsi lainnya	13 360	13 570	1,30	1,44
M. Makanan dan minuman jadi	197 451	168 678	19,18	17,86
N. Tembakau dan sirih	50 357	57 720	4,89	6,11

Sumber: Olah Susenas 2019, Kabupaten Barito Kuala

Tabel 7.3 Pengeluaran Nonmakanan Per kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 s.d. 2019

JENIS PENGELUARAN	Rata-rata Pengeluaran		Persentase(%)	
	Persentase (Rp)		2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
NON MAKANAN	484 684	424 506	47,07	52,93
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	259 295	221 907	25,18	23,49
Aneka barang & jasa	90 227	88 856	8,77	9,41
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	31 555	26 689	3,06	2,83
Barang tahan lama	66 849	40 893	6,49	4,33
Pajak, pungutan, dan asuransi	22 164	28 913	2,15	3,06
Keperluan pesta dan upacara	14 546	17 249	1,41	1,83
JUMLAH PENGELUARAN MAKANAN DAN NON MAKANAN	1 029 615	944 672	100	100

Sumber: Olah Susenas 2019, Kabupaten Barito Kuala

Berdasarkan Tabel 7.2 dan Tabel 7.3 terlihat bahwa pada tahun 2019 porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga kelompok makanan yang terbesar adalah konsumsi padi-padian dan makanan jadi. Pada kelompok padi-padian sebesar 7,36 persen, meningkat dari tahun

sebelumnya yang sebesar 7,06 persen. Sementara itu, pengeluaran untuk makanan/minuman jadi justru menurun yang sebelumnya sebesar 19,18 persen menjadi 17,86 persen. Konsumsi bahan makanan terbesar selanjutnya ada pada kelompok ikan/udang/cumi/kerang dengan besaran mencapai 6,17 persen, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 1,23 persen. Lebih lanjut, kelompok makanan terbesar setelah itu adalah rokok yang pada tahun 2019 meningkat cukup signifikan yang sebelumnya hanya 4,89 di tahun 2018 menjadi sebesar 6,11 persen pada tahun 2019. Pada kelompok non makanan, pembiayaan untuk konsumsi perumahan dan fasilitas rumah memiliki proporsi terbesar yaitu mencapai 23,49 persen. Selanjutnya terdapat pembiayaan untuk neka barang dan jasa termasuk di dalamnya biaya kesehatan dan pendidikan yaitu sebesar 9,14 persen.

7.2 Distribusi Pendapatan

Peningkatan kesejahteraan penduduk yang dilihat dari peningkatan pendapatan idealnya diikuti dengan pemerataan pendapatan. Pemerataan pendapatan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Tidak tersedianya data pendapatan menyebabkan penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai *proxy* pendapatan. Walaupun dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, paling tidak dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi.

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan penduduk adalah dengan menggunakan kriteria Bank Dunia. Menurut kriteria Bank Dunia penduduk digolongkan menjadi tiga kelas yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Selain kriteria yang ditetapkan oleh Bank Dunia, ada indikator yang juga sering digunakan, yaitu Indeks Gini. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk menurut kriteria Bank

Dunia terpusat pada 40 persen penduduk berpendapatan terendah. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk ini digambarkan oleh porsi pendapatan dari kelompok pendapatan ini terhadap seluruh pendapatan penduduk, yang digolongkan sebagai berikut :

- a. memperoleh < 12 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap tinggi,
- b. memperoleh 12-17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap sedang,
- c. memperoleh > 17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap rendah.

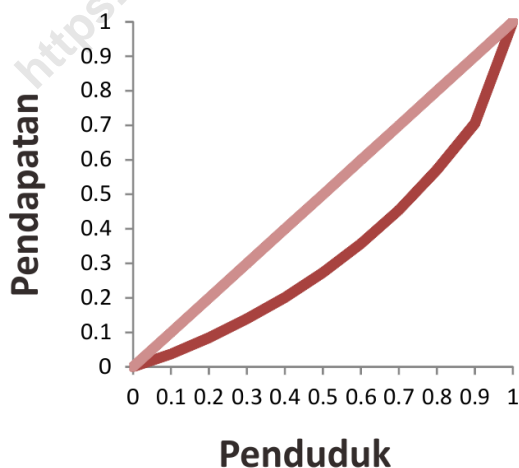
Tabel 7.4 Distribusi Pembagian Pengeluaran per Kapita dan Indeks Gini, Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 s.d. 2019

Tahun	40 % [Bawah]	40 % [Tengah]	20 % [Atas]	Gini Ratio (Indeks Gini)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2008	22,87	39,14	37,99	0,27
2009	23,09	37,25	39,66	0,29
2010	23,91	38,53	37,56	0,26
2011 Backcasting	20,89	36,84	42,28	0,32
2012 Backcasting	21,16	36,77	42,06	0,32
2013 Backcasting	20,79	35,57	43,63	0,33
2014	20,13	36,98	42,89	0,34
2015	19,27	35,55	45,18	0,36
2016	21,29	39,04	39,67	0,31
2017	22,35	37,23	40,42	0,31
2018	14,35	26,00	59,63	0,34
2019	16,27	28,73	55,00	0,28

Sumber: Hasil Susenas Kabupaten Barito Kuala

Berdasarkan data Susenas 2019 Pada Tabel 7.4., untuk wilayah Kabupaten Barito Kuala, dapat dihitung bahwa 40 persen penduduk yang berpendapatan paling rendah menerima 16,27 persen dari seluruh pendapatan masyarakat. Berdasarkan kriteria Bank Dunia, dapat dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Barito Kuala tahun 2019 dianggap sedang. Sedangkan untuk golongan 40 persen penduduk yang berpendapatan menengah menerima 28,73 persen dari seluruh pendapatan masyarakat, sementara golongan 20 persen penduduk yang berpendapatan paling atas menerima 55,00 persen dari seluruh pendapatan masyarakat.

Ukuran yang juga digunakan untuk mengetahui ketimpangan distribusi pendapatan adalah indeks gini. Indeks Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna, dimana semua nilai sama) hingga satu (ketimpangan yang sempurna, dimana satu orang menguasai semuanya dan yang lainnya nihil). Koefisien Gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada.



Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin rendah, sebaliknya semakin mendekati 1 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran

semakin tinggi. Jika rasio lebih dari 0,5, maka terjadi ketimpangan yang tajam dan cukup serius, dan jika rasio berkisar antara 0,30–0,49 maka distribusi pendapatan relatif merata. Olah data Susenas menunjukkan bahwa Indeks Gini Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2019 sebesar 0,28. Hal ini berarti bahwa distribusi pendapatan penduduk Barito Kuala cukup merata. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan gini ratio pada tahun 2018 yang nilainya 0,34, artinya distribusi pendapatan antar kelompok pendapatan relatif kurang merata dibandingkan tahun 2018.

7.3 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan yang sangat kompleks yang terjadi di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Berbagai upaya telah dan masih dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan. Bahkan pengentasan kemiskinan menjadi salah satu isu global yang tercantum dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan pertama SDGs yang berbunyi mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun mempunyai target yaitu pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari. Tingkat kemiskinan ekstrim didefinisikan sebagai proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan internasional dan untuk menentukan garis kemiskinan internasional tersebut perlu mempertimbangkan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*) masing-masing negara yang berbeda-beda.

Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran (BPS). Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan menjadi masalah utama yang terjadi di setiap negara, termasuk Indonesia. Angka kemiskinan yang masih tinggi di Indonesia menunjukkan program pengentasan kemiskinan belum mencapai hasil optimal. Hal ini disebabkan beberapa kebijakan yang sebenarnya ditujukan untuk menekan

angka kemiskinan, justru lebih berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, bukan pemerataan terhadap sumber daya ekonomi.

Kemiskinan menjadi isu penting dalam pembangunan, terutama bagi Indonesia sebagai negara berkembang. Kemiskinan berdampak pada pemenuhan aspek kehidupan lain seperti kesehatan, pendidikan serta sandang dan pangan. Hubungan ini seperti lingkaran setan dimana jika tidak diputus, akan tetap berlanjut bahkan tingkat kemiskinan menjadi semakin tinggi. Pengentasan kemiskinan yang terukur dan terarah menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan. Oleh karena itu, penentuan konsep dan definisi orang miskin harus selaras agar terdapat keterbandingan pembangunan antardaerah.

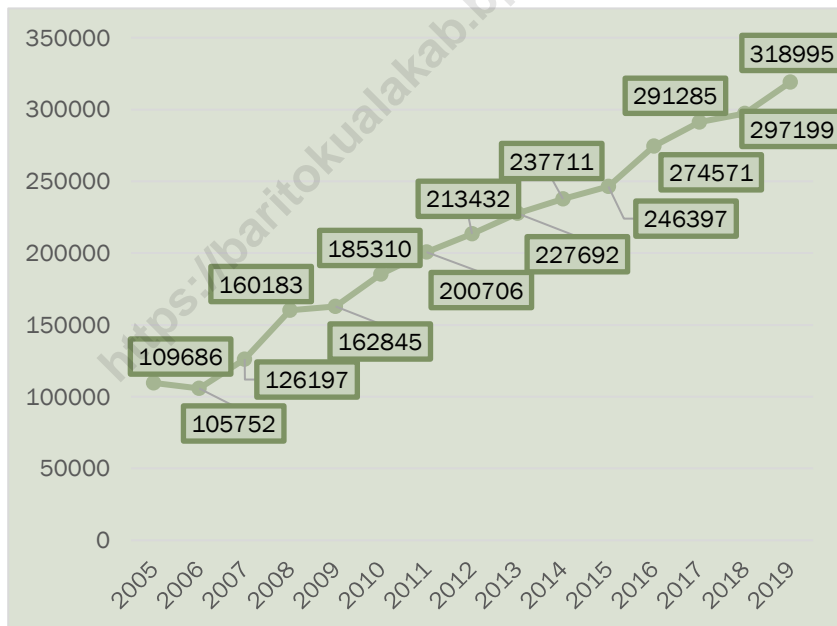
Untuk mengukur kemiskinan, BPS (2008) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Pendekatan ini memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan (GK) yang terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar yang diukur dari tingkat konsumsi atau pengeluaran, ada 3 ukuran kemiskinan yang digunakan, yaitu:

- *Head Count Index*(HCI- P_0), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
- Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*- P_1) yang merupakan rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*- P_2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Garis Kemiskinan

Penghitungan penduduk miskin tidak terlepas dari garis kemiskinan yang ditetapkan. Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2019, garis kemiskinan per kapita di Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 318.995,-. Hal ini berarti bahwa penduduk yang pengeluaran untuk konsumsinya per bulan kurang dari Rp. 318.995,- dapat dikatakan sebagai penduduk miskin. Besaran garis kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala secara tren mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak tahun 2005 sampai tahun 2019 seperti yang terlihat pada grafik berikut.

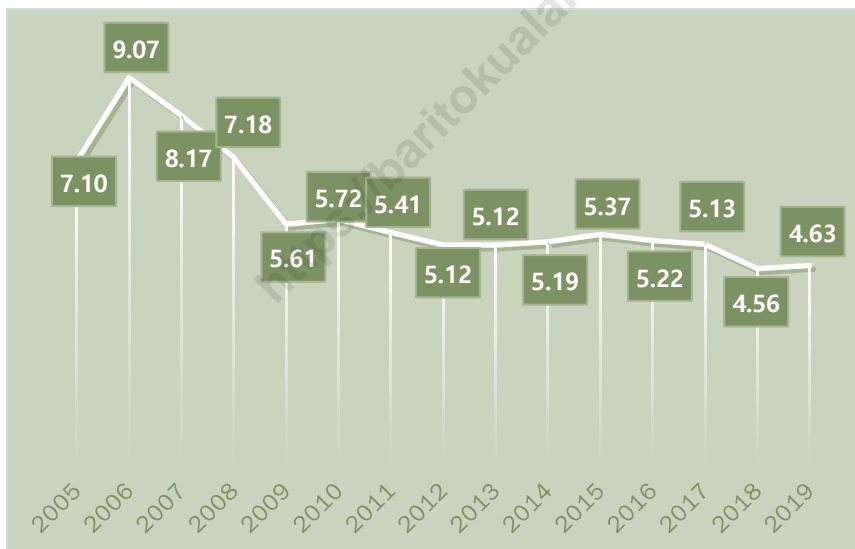


Sumber: Hasil Olah Susenas, BPS Kabupaten Barito Kuala

Gambar 7.2 Garis Kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala, 2005-2019

Jumlah Penduduk Miskin

Penduduk miskin di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan tren yang menurun sepanjang periode 2005-2019. Pada tahun 2005, tercatat bahwa ada 7,10 persen penduduk miskin di Barito Kuala. Meskipun sempat mengalami kenaikan yang cukup tajam di tahun 2006, namun dari tahun 2007 sampai 2019 cenderung turun dari tahun ke tahun. Upaya pemerintah dalam hal mengurangi kemiskinan yang terus diagendakan setiap tahun menunjukkan hasil yang positif. Pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin berkurang menjadi sekitar 4,63 persen dari jumlah penduduk di Kabupaten Barito Kuala. Jumlah penduduk miskin mengalami sedikit kenaikan dari tahun sebelumnya, dimana tahun 2018 jumlah penduduk miskin sebesar 4,56 persen. Kenaikan angka kemiskinan ini sejalan dengan kenaikan garis kemiskinan. Oleh karena itu, program pemerintah diharapkan terus dilanjutkan untuk mengurangi angka kemiskinan.



Sumber: Hasil Susenas BPS Kabupaten Barito Kuala

Gambar 7.3 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005 s.d. 2019

Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks kedalaman kemiskinan (P_1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Pada tahun 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan sebesar 0,44. Perubahan angka indeks ini cukup fluktuatif. Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2018, angka ini mengalami penurunan sebesar 0,13 poin. Jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2005, dalam kurun waktu 15 tahun, terjadi penurunan angka indeks kedalaman kemiskinan dari 1,26 menjadi 0,44. Penurunan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Diharapkan dengan nilai P_1 yang semakin kecil, penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan dapat terangkat dari kondisi miskin.

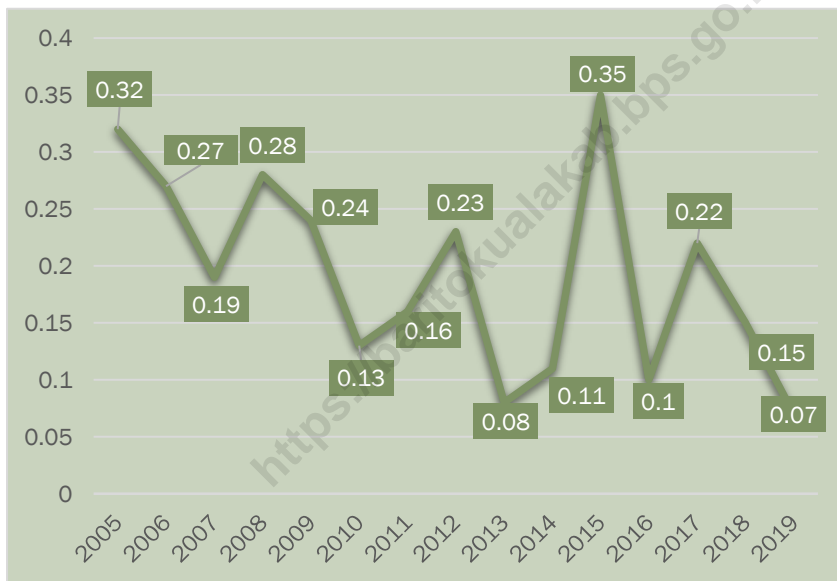


Sumber: Hasil Susenas Kabupaten Barito Kuala

Gambar 7.4 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2002 s.d. 2019

Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menggambarkan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan Barito Kuala pada tahun 2019 sebesar 0,07. Hal ini menggambarkan bahwa masih ada ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Barito Kuala. Walaupun perubahan angka indeks ini cukup fluktuatif, tetapi secara keseluruhan menunjukkan tren menurun yang berarti bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin dari tahun ke tahun semakin rendah, seperti yang terlihat pada Gambar 7.5 berikut.



Sumber: Hasil Susenas Kabupaten Barito Kuala

Gambar 7.5 Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005 s.d. 2019



BAB VIII

SIMPULAN

<https://babs-go.id>



BAB VIII

KESIMPULAN

Terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil analisis deskriptif indikator kesejahteraan rakyat Kabupaten Barito Kuala tahun 2019 yang telah disajikan, antara lain sebagai berikut:

- Pada tahun 2019 Berdasarkan proyeksi penduduk jumlahnya sebesar 313.595 jiwa. Selama kurun waktu lima tahun sejak tahun 2014 terjadi penambahan penduduk sebanyak 19.486 jiwa atau sebesar 6,62 persen.
- *Sex ratio* Kabupaten barito Kuala pada tahun 2019 menunjukkan angka sebesar 101. Hal ini berarti bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki. Penduduk Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2019 didominasi laki-laki pada kelompok usia muda (0 s.d. 19 tahun).
- Piramida penduduk kabupaten Barito Kuala merupakan piramida penduduk muda (*expensive*) yang ditandai dengan bagian dasar lebih lebar dari bagian puncaknya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda dan sedang mengalami pertumbuhan dengan tingkat kelahiran dan kematian yang relatif tinggi.
- Berdasarkan data Susenas Pada tahun 2019, dari seluruh penduduk perempuan berusia 15 s.d. 49 tahun berstatus pernah kawin dan sedang menjadi peserta KB aktif sebesar 68,14 persen. Data tersebut juga menunjukkan ternyata masih terdapat wanita usia subur yang tidak pernah menggunakan alat KB yaitu sebesar 20.54 persen.
- Pada tahun 2019, Angka Morbiditas Kabupaten Barito Kuala tahun 2019 sebesar 18,30 persen, yang berarti bahwa dari 100 orang penduduk, terdapat 18 s.d. 19 penduduk yang mengalami keluhan

kesehatan dan aktivitas sehari-harinya terganggu akibat keluhan tersebut.

- Persentase perempuan pernah kawin yang melahirkan di bukan fasilitas kesehatan masih cukup tinggi, yaitu sebesar 25,71 persen. Sedangkan sisanya sebesar 74,29 persen melahirkan di Fasilitas Kesehatan.
- Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas pada tahun 2019 sebesar 6,72 tahun. Hal ini berarti bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas yang tinggal di Kabupaten Barito Kuala menempuh pendidikan sampai dengan kelas 1 (satu) SMP saja atau putus sekolah dikelas 2 (dua) SMP.
- Pada tahun 2019, APS usia 7-12 tahun mencapai 99,31 persen. Angka ini menunjukkan bahwa sebanyak 99,31 persen penduduk usia 7 s.d. 12 tahun sedang menjalani pendidikan atau masih bersekolah. Angka Partisipasi Sekolah untuk usia 13-15 tahun mencapai 98,11 persen yang berarti bahwa terdapat 1 s.d. 2 orang dari 100 penduduk usia 13 s.d. 15 tahun yang tidak bersekolah pada tahun 2019. Sedangkan APS pada kelompok usia 16 s.d. 18 tahun sudah cukup baik yaitu sebesar 73,93 persen.
- Berdasarkan Data Susenas 2019, APM SD sebesar 98,77 persen yang berarti bahwa dari 100 anak usia 7 s.d 12 tahun, terdapat 1 s.d. 2 anak yang tidak bersekolah atau sudah tidak duduk di bangku SD. Selanjutnya, APM SMP sebesar 76,08 persen, artinya dari 100 anak usia 13-15 tahun terdapat 23 s.d. 24 anak yang tidak bersekolah atau sudah tidak duduk di bangku SMP. Sementara APM SMA di Kabupaten Barito Kuala adalah 61,56 persen.
- Pada tahun 2019, proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang berstatus bekerja sebesar 97,27 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang termasuk angkatan kerja, terdapat sebanyak 97 s.d. 98 penduduk yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi atau masuk dalam dunia kerja.

- Sektor lapangan usaha di Kabupaten Barito Kuala yang mampu menyerap tenaga kerja terbanyak adalah sektor pertanian sebesar 50,14 persen.
- Pada tahun 2019, di Kabupaten Barito Kuala terdapat sekitar 29,35 persen penduduk bekerja di sektor formal dan selebihnya sekitar 70,65 persen bekerja di sektor informal.
- Pada tahun 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Barito Kuala sebesar 2,51 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk angkatan kerja, 2 s.d. 3 orang diantaranya adalah pengangguran.
- Berdasarkan hasil Susenas 2019 Kabupaten Barito Kuala, secara umum sebagian besar rumah tangga sudah tinggal di rumah milik sendiri yaitu sekitar 85,64 persen, sedangkan sisanya sebesar 14,36 persen masih bertempat tinggal di rumah sewa/kontrak, rumah dinas, dsb.
- Pada tahun 2019 di Kabupaten Barito Kuala persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum bersih dan layak sebesar 60,01 persen, sementara sisanya yaitu sebesar 39,99 persen rumah tangga masih menggunakan sumber air tidak bersih seperti yang berasal dari sumur/mata air tak terlindung, air permukaan (air sungai), air hujan, dan lainnya.
- Ditinjau dari sumber penerangan utama, mayoritas rumah tangga di Barito Kuala telah menggunakan penerangan listrik yang bersumber dari PLN yaitu sebesar 96,82 persen. Akan tetapi, masih terdapat rumah tangga yang tidak menggunakan listrik yaitu sebanyak 0,61 persen.
- Berdasarkan data Susenas 2019, di Kabupaten Barito Kuala mayoritas rumah tangga berada pada kelompok pengeluaran sebulan perkapita Rp500.000,- s.d. Rp749.999,- yaitu sebesar 29,83 persen dari total rumah tangga yang ada di Kabupaten Barito Kuala

- Indeks Gini Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2019 sebesar 0,28. Hal ini berarti bahwa distribusi pendapatan penduduk Barito Kuala relatif merata.
- Pada tahun 2019, Garis Kemiskinan per kapita di Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 318.995,-.
- Pada tahun 2019, proporsi penduduk miskin sebesar 4,63 persen dari jumlah penduduk di Kabupaten Barito Kuala. Proporsi penduduk miskin mengalami sedikit kenaikan dari tahun sebelumnya, dimana tahun 2018 jumlah penduduk miskin sebesar 4,56 persen.
- Pada tahun 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan sebesar 0,44. Perubahan angka indeks ini cukup fluktuatif. Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2018, angka ini mengalami penurunan sebesar 0,13 poin.
- Indeks Keparahan Kemiskinan Barito Kuala pada tahun 2019 sebesar 0,07. Hal ini menggambarkan bahwa masih ada ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Barito Kuala. Walaupun perubahan angka indeks ini cukup fluktuatif, tetapi secara keseluruhan menunjukkan tren menurun yang berarti bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin dari tahun-ketahun semakin rendah.



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://baritokualakab.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala

Jalan Jenderal Sudirman No. 72, Marabahan, 70513
Telepon +62 511 4799057, Fax : +62 511 4799057 Email :
bps6304@bps.go.id
Website: <http://baritokualakab.bps.go.id>

ISBN 978-623-6799-10-9



9 786236 799109